REVISI RENSTRA

REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2017 - 2022

2017

2022

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

http://perindag.babelprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya jualah Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 ini dapat disusun dengan baik.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan membuat rencana strategis sebagai pedoman kerja setiap perangkat kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Namun demikian dalam perjalanannya nanti, apabila ada ketidaktepatan, disertai antisipasi perubahan perkembangan keadaan yang terjadi, maka Renstra ini dapat direvisi dengan tetap mempedomani aturan yang berlaku.

Demikian, semoga Revisi Renstra ini dapat dipedomani, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.

Pangkalpinang, Agustus 2020

KEPALA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Drs. H. SUNARDI, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 19631223 198603 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
B A B I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
Gambar 1.1 3
Hubungan Dokumen Renstra OPD 3
dengan Dokumen Lainnya 3
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 6
1.3.1. Maksud 6
1.3.2. Tujuan 6
1.4. Sistematika Penulisan 7
B A B II 10
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 10
2.1. Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 10
2.1.1. Tugas 10
2.1.2. Fungsi 10
2.1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah 11
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 22
Gambar 2.1 23
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan 23
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 23
Gambar 2.2 24
Pemetaan Bidang Dinas Perindustrian dan Perdagangan 24
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai Permendagri 90 24
Gambar 2.3 24
Pemetaan Urusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 24
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai Permendagri 90 24
Gambar 2.3 25
Draff Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan 25
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai Permendagri 90 25
2.2.1. Sumber Daya Aparatur / Pegawai 25

Tabel 2.2.1 Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2020 Berdasarkan Kelompok Jabatan, Pendidikan dan Jenis Kelamin 26

2.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana 27

Tabel 2.2.2 Rekapitulasi Buku Inventaris Milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2016 27

2.3. Kinerja Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan 28

Tabel 2.3.1 29

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 29

Tabel 2.3.2 31

Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 31

Tabel 2.3.3 38

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 38

Tabel 2.3.4 39

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 39

B A B III 43

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 43

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan 43

A. Urusan Industri 43

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 47

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 49

3.3.1. Renstra Kementerian Perindustrian RI Tahun 2020 – 2024 49

3.3.2. Renstra Kementerian Perdagangan RI Tahun 2020 – 2024 50

BAB IV 53

TUJUAN DAN SASARAN 53

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan 53

Tabel 4.1.1 53

Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 53

Tabel 4.1.2 54

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 54

4.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD 57
Tabel 4.1.2 57
Hubungan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD 57
Tabel 4.1.3 59
Hubungan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD menyesuaikan PMDN90 59
BAB V 60
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 60
5.1. Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan 60
Tabel 5.1.1 61
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 61
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 61
Tabel 5.1.2 68
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan menyesuaikan PMDN90 68
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 68
BAB VI 71
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 71
6.1. Rencana Program Kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran 71
Tabel 6.1 80
Rencana Program dan Kegiatan yang Mendukung Tujuan dan Sasaran 80
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 80
Tabel 6.2 102
Rencana Program dan Kegiatan yang Mendukung Tujuan dan Sasaran 102
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 102
BAB VII 120
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 120
7.1. Tujuan sasaran strategi dan arah kebijakan 120
Tabel 7.1.1 121
Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 121
Tabel 7.1.2 122

Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan 122
BAB VIII 123
PENUTUP 123
8.1. Kesimpulan 123
8.2. Kaidah Transisi 124
8.3. Kaidah Pelaksanaan 124

B A B I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengatur untuk mewujudkan sistem perencanaan daerah yang handal dan merupakan kunci pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan daerah akan sesuai dengan harapan apabila melalui perencanaan yang tersusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan isu strategis. Hal ini bertujuan untuk mendorong koordinasi antara pelaku pembangunan guna terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sehingga tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah, menyatakan bahwa ruang lingkup perencanaan daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah. Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama dengan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun dokumen dimaksud diantaranya adalah Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah bagian dari capaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah "PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN 2025", yang ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu:

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM.
3. Mewujudkan pemerintahan yang amanah.

4. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan
5. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Saat ini pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada tahap ketiga RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 yang difokuskan pada upaya untuk menjaga dan meningkatkan perekonomian daerah serta upaya pemenuhan kapasitas dan kualitas SDM.

Revisi Rencana Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan resmi Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Perangkat Daerah dan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Perangkat Daerah bertanggungjawab atas kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

Selain itu urgensi penyusunan Revisi Renstra Perangkat Daerah ini adalah:

a. Menjadi acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah;
b. Dasar penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah;
c. Menjadi acuan penyusunan LAKIP Perangkat Daerah;
d. Sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap focus pada pemecahan masalah-masalah yang mendasar.

Secara umum Renstra Perangkat Daerah diharapkan dapat menjawab 2 (dua) hal mendasar yaitu:

a. Arah pelayanan yang akan dilaksanakan, dikembangkan dan hendak dicapai Perangkat Daerah 5 tahun kedepan;
b. Langkah-langkah strategi yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan mendasar dan tantangan terkini yang dihadapi dalam pembangunan sektor Industri dan Perdagangan. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan serta dukungan dari pada masyarakat, stake holder yang terkait dengan perindustrian dan perdagangan serta pihak eksekutif dan legislatif baik dalam bentuk fasilitasi kebijakan maupun pendanaan yang sangat erat kaitannya dengan implentasi program dan kegiatan yang menjadi wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Revisi Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Bangka Belitung maupun isu-isu strategis di tingkat nasional maupun internasional, yang disesuaikan dengan perubahan kewenangan yang dilimpahkan ke Kabupaten/Kota.

Hubungan antar dokumen perencanaan lainnya dengan Renstra mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.1
Hubungan Dokumen Renstra OPD
dengan Dokumen Lainnya

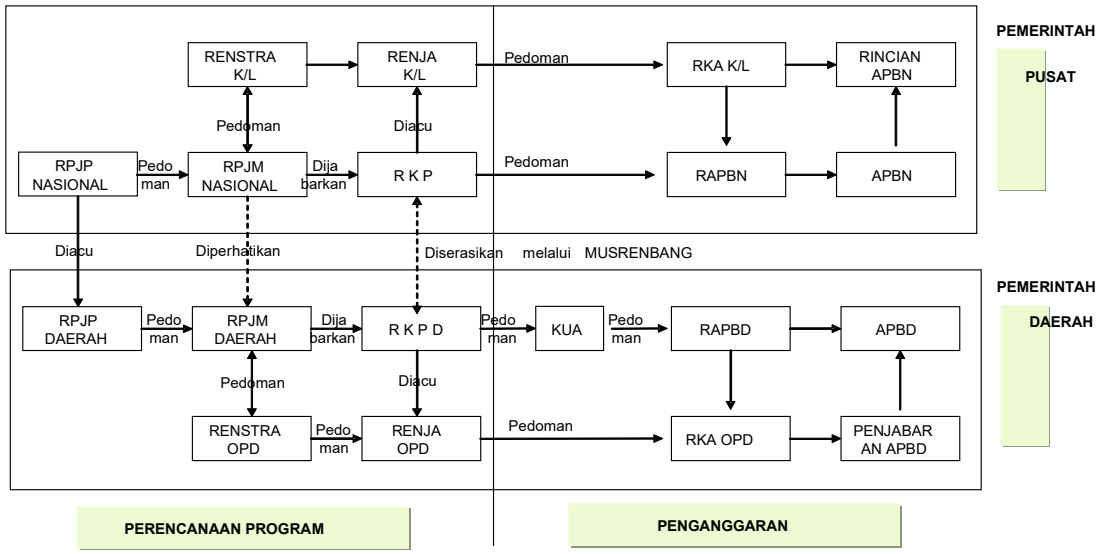

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Revisi Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonedia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

m. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034) (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);

n. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri A);

o. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);

p. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);

q. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D).

r. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 78 Seri F).

1.3. Maksud dan Tujuan

Revisi Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Revisi Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 adalah untuk:

a) menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 menjadi tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022
b) Memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan dengan melakukan perencanaan terpadu dan menyelaraskan pelaksanaan program serta mengendalikannya untuk kurun waktu 2017 - 2022, sehingga diharapkan mampu mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
c) Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.
d) Mendorong terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan penyusunan Revisi Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 adalah:

a) Penyediaan suatu dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah di bidang perindustrian dan perdagangan.

b) Sebagai perencanaan arah kebijaksaan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.
c) Menjadikan indikator dan bahan evaluasi untuk perbaikan, peningkatan kinerja pada masa mendatang.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara umum bahwa Revisi Renstra Dinas Perindusrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN
   1.1 Latar Belakang
   Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.
   1.2 Landasan Hukum
   Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
   1.3 Maksud dan Tujuan
   Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah
   1.4 Sistematika Penulisan
   Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.
2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
   Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode

sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

3. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

4. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

5. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

6. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

7. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

8. BAB VIII PENUTUP

8.1 Kesimpulan

8.2 Kaidah Transisi

8.3 Kaidah Pelaksanaan

B A B II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran Pelayanan OPD dalam konteks penyusunan Rencana Strategis diperlukan didalam menjabarkan tujuan, fungsi dan struktur organisasi yang dalam hal ini adalah terkait dengan kelembagaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terkait dengan kondisi kepegawaian, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki, kinerja pelayanan yang dilaksanakan tentunya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta tantangan dan peluang didalam usaha untuk mengembangkan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.1. Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

2.1.1. Tugas

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;

b. penyelenggaran kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;

c. penyelenggaraan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas perindustrian dan Perdagangan; dan

e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai susunan organisasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 yaitu:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;

b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;

c. penyelenggaraan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;

e. penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;

f. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

g. penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan

h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi perencanaan, umum, keuangan serta membantu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengoordinasikan bidang-bidang.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
b. penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
d. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat dibantu oleh tiga Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Perencanaan;

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan;

c. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian program;

d. pelaksanaan fasilitasi kerja sama dengan unit kerja terkait;

e. pelaksanaan penyusunan laporan;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;

h. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Subbagian Perencanaan dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

2. Sub Bagian Umum;

Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, urusan kehumasan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengelolaan kearsipan;

b. pelaksanaan pengelolaan kepustakaan;

c. pelaksanaan pengelolaan data kepegawaian;

d. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan pegawai;

e. pelaksanaan penyiapan bahan kesejahteraan pegawai;

f. pelaksanaan penyiapan bahan efisiensi dan tata laksana;

g. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;

h. pelaksanaan penyelenggaraan kehumasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

i. pelaksanaan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

j. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Subbagian Umum dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Sub Bagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;

b. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;

c. pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

d. pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;

e. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;

f. pelaksanaan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan;

g. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan

h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Subbagian Keuangan dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

3. Bidang Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri

Bidang Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri.

Bidang Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraandanpengoordinasian penyusunan program kegiatan bidang pengembangan wilayah dan pengawasan industri;

b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan industri Provinsi;

c. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyebaran dan pembangunan industri di wilayah industri Provinsi;

d. penyelenggaraan dan Pengoordinasian pengawasan standar produk industri di wilayah Provinsi;

e. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengumpulan data industri dan pengelolaan sistem informasi industri;

f. penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian rekomendasi perizinan usaha industri (IUI) besar, izin perluasan usaha industri (IPUI) industri besar dan perizinan usaha kawasan industri yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota;

g. penyelenggaraan dan pengoordinasian pemetaan wilayah dan industri di Provinsi;

h. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan dan evaluasi standar produk industri di wilayah Provinsi;

i. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan dan pengendalian usaha industri besar dan usaha kawasan industri yang lokasinya lintas Kabupaten/Kota;

j. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri;

k. penyelenggaraan administrasi di bidang Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri;

l. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai aparatur Sipil Negara; dan

m. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri dibantu oleh tiga Seksi yaitu :

1. Seksi Pengembangan Wilayah Industri mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengembangan wilayah industri.
2. Seksi Informasi dan Perizinan Industri, mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis informasi dan perizinan industri.
3. Seksi Pengawasan Industri, mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengawasan industri.
4. Bidang Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri

Bidang Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan sumberdaya, ketahanan dan akses industri.

Bidang Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

n. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kegiatan bidang Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri;
o. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan pengembangan sumber daya manusia industri di wilayah Provinsi;
p. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan penjaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri di wilayah Provinsi;
q. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi untuk industri di wilayah Provinsi;
r. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan pembiayaan yang kompetitif bagi industri di wilayah Provinsi;

s. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri di wilayah Provinsi;

t. penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian fasilitas dalam rangka mempercepat pembangunan industri di wilayah Provinsi;

u. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan penjaminan ketersediaan infrastruktur industri di wilayah Provinsi;

v. penyelenggaraan promosi Industri di tingkat Provinsi dan nasional;

w. penyelenggaraan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Sumber Daya, Ketahanan dan Akses Industri;

x. penyelenggaraan administrasi di bidang Pengembangan Sumber Daya, Ketahanan dan Akses Industri;

y. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan

z. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengembangan Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri dibantu oleh tiga Seksi yaitu :

1. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Industri, mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis peningkatan kualitas sumber daya manusia industri.
2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Industri, mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengembangan sumber daya alam dan teknologi industri.
3. Seksi Fasilitasi dan Akses Industri, mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji

ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis fasilitasi dan akses industri.

5. Bidang Pengembangan Perdagangan

Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bidang Pengembangan Perdagangan.

Bidang Pengembangan Perdagangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi;
b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Penyediaan ketersediaan barang pokok dan barang penting;
c. penyelenggaraan operasi pasar, pasar murah serta pemantauan harga dan stok;
d. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Pengawasan pupuk bersubsidi;
e. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan penyediaan sistem informasi perdagangan dan pelaksanaan pengumpulan data Perdagangan;
f. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin);
g. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Perdagangan Mineral keluar Provinsi (SKPMKP) dan Surat Keterangan Pengemasan Ulang Produk Pangan Pokok (SKPUP3);
h. penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian rekomendasi pembangunan pasar;
i. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan partisipasi dalam pameran dagang internasional, pameran dagang nasional dan

pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor dan produk dalam negeri asal 1 (satu) Provinsi;

j. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan pembinaan terhadap pelaku usaha melalui fasilitasi pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan ekspor dan produk dalam negeri untuk perluasan akses pasar produk ekspor dan produk dalam negeri;

k. penyelenggaraan dan pengoordinasian Pemetaan produk dan penyelenggaraan pencitraan produk ekspor dan produk unggulan daerah skala nasional;

l. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan verifikasi perizinan Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) dan perizinan Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea, perizinan Usaha Perdagangan Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (SIUP PT B2);

m. penyelenggaraan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Perdagangan;

n. penyelenggaraan administrasi di bidang Pengembangan Perdagangan;

o. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan

p. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

Bidang Pengembangan Perdagangan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengembangan Perdagangan dibantu oleh tiga Seksi yaitu :

1. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.
2. Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis pengembangan perdagangan luar negeri.

3. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN) mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN).

6. Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian

Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian.

Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Pelayanan Perlindungan Konsumen;

b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan pemberdayaan Konsumen;

c. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan pengawasan Kegiatan di Bidang Perdagangan dan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Pasar dan tempat penyimpanan;

d. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan penegakan hukum pelanggaran di Bidang Perdagangan dan perlindungan konsumen di seluruh daerah Kabupaten/Kota;

e. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan pembinaan sumber daya manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perdagangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS–PK), petugas pengawas barang dan jasa (PPBJ) dan petugas pengawas tertib niaga (PPTN);

f. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan standard ukuran unit metrologi legal Kabupaten/Kota;

g. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Interkomparasi standar ukuran milik unit metrologi legal Kabupaten/Kota;

h. penyelenggaraan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian;

i. penyelenggaraan administrasi di bidang perlindungan konsumen dan kemetrologian;

j. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan

k. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengembangan Perdagangan dibantu oleh tiga Seksi yaitu :

1. Seksi Pengawasan dan Tertib Niaga mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Pengawasan dan Tertib Niaga.
2. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen.
3. Seksi Standardisasi dan Kemetrologian mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis standardisasi dan kemetrologian.

   (sesuai dengan UU 23/2014 urusan kemetrologian diserahkan ke Kabupaten/Kota)
4. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

   a. Sub Bagian Tata Usaha

   b. Seksi Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi

   c. Seksi Pengendalian Mutu
5. UPTD Rumah Promosi dan Kemasan

   d. Sub Bagian Tata Usaha

   e. Seksi Pelayanan Teknis, Pengawasan dan Produksi

f. Seksi Promosi

6. Kelompok Jabatan Fungsional

a. JFT Penyuluh Perindag

b. JFT Penguji Mutu Barang

c. JFT Perencana Pertama

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai struktur organisasi sebagaimana gambar berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

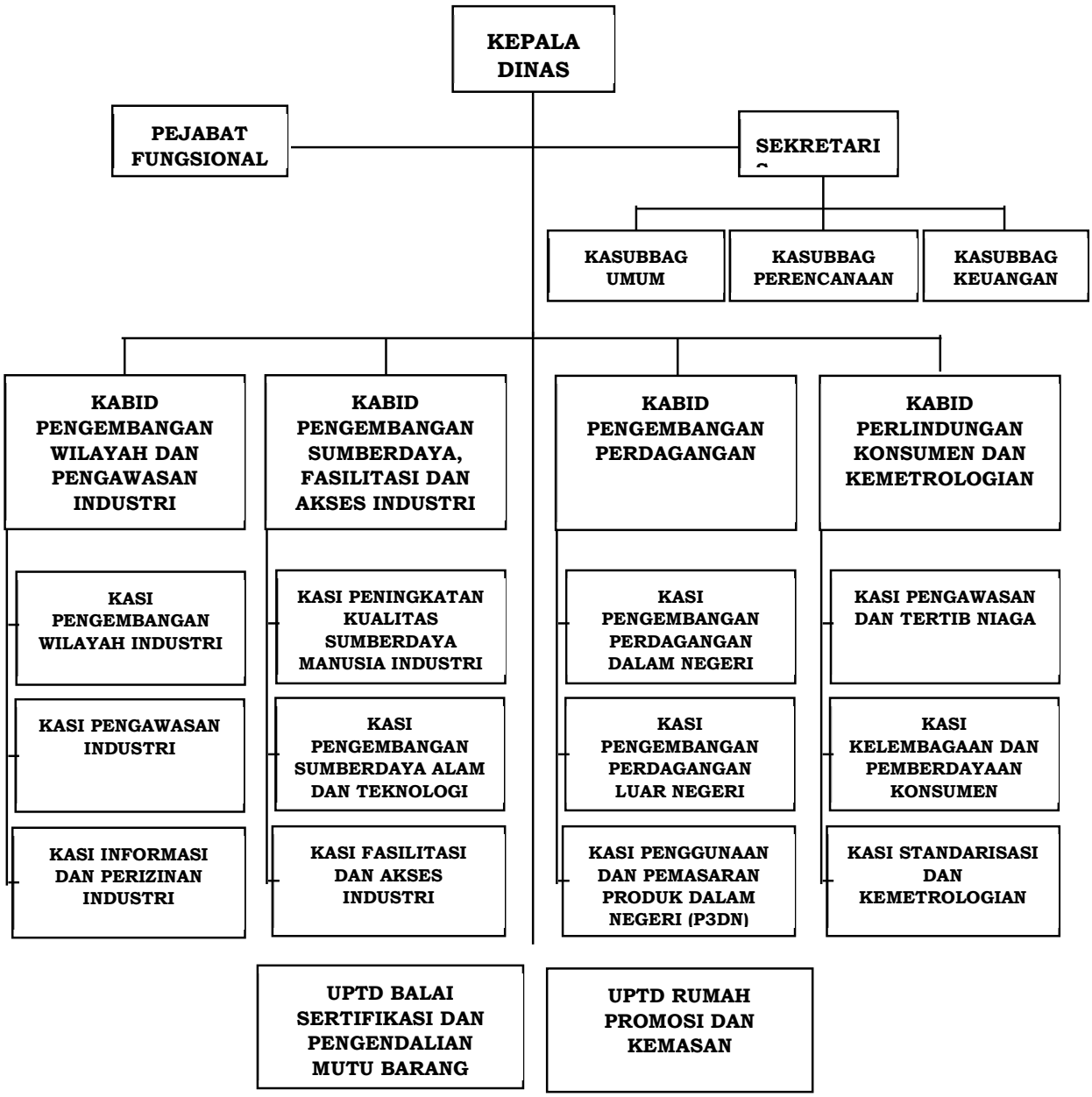

Gambar 2.2
Pemetaan Bidang Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai Permendagri 90

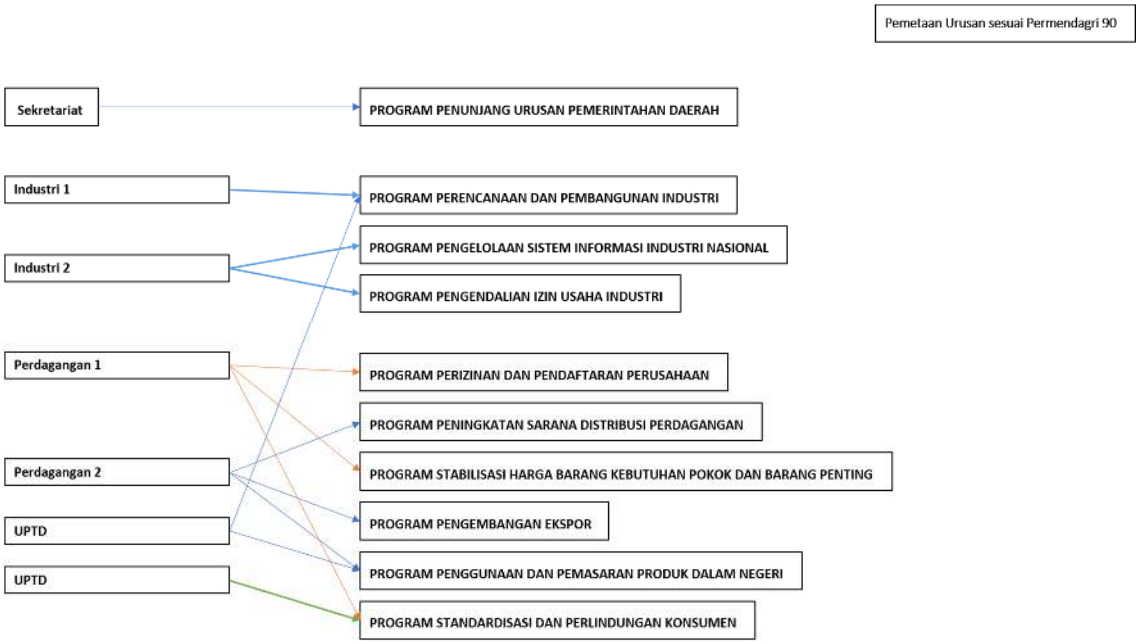

Gambar 2.3
Pemetaan Urusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai Permendagri 90

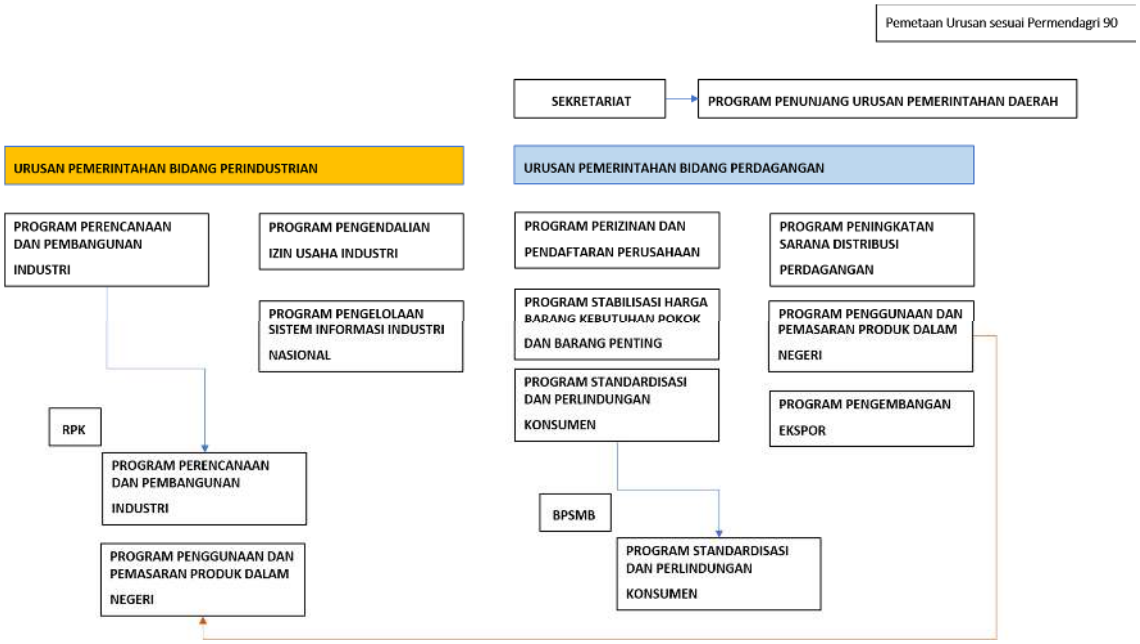

Gambar 2.3
Draff Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai Permendagri 90

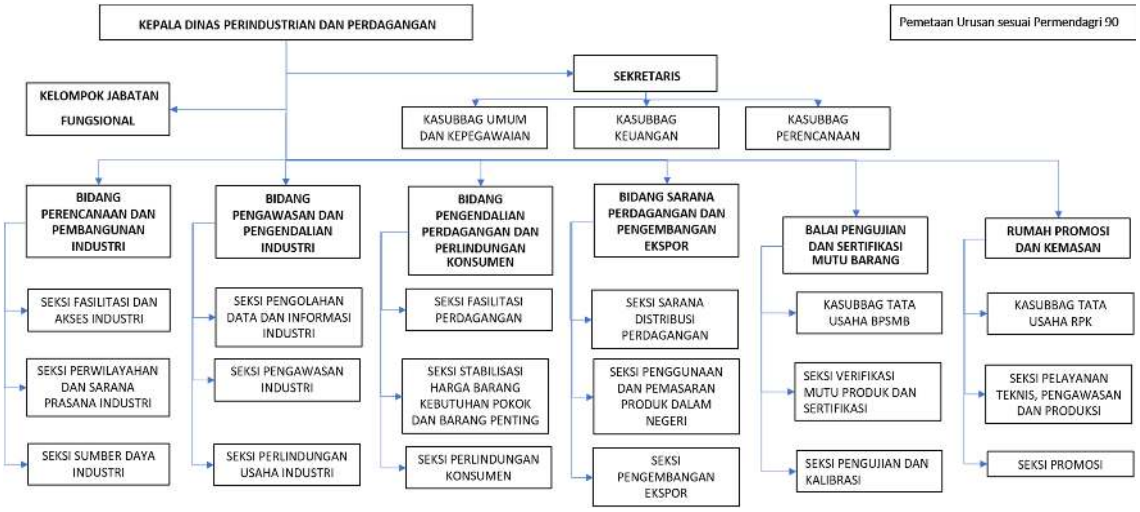

2.2.1. Sumber Daya Aparatur / Pegawai

Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 berdasarkan pendistribusian dapat dilihat sebagai berikut:

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas.

Berkenaan dengan sumber daya manusia tersebut, berdasarkan data kepegawaian maka jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan bulan Juli 2020 adalah sebanyak 94 orang, terdiri dari 1 orang atau 1,06 % berpendidikan doktor/S3; 11 orang atau 11,70 % berpendidikan master/S2; 56 orang atau 59,57 % berpendidikan sarjana/S1; 15

orang atau 15,95 % Sarjana muda/D3, 11 orang atau 11,73 % berpendidikan SLTA. Postur dan rincian data pegawai dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2.1 Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2020 Berdasarkan Kelompok Jabatan, Pendidikan dan Jenis Kelamin

KELOMPOK JABATAN	NAMA JABATAN		TINGKAT PENDIDIKAN								JUMLAH
			S3		S2		S1		NON S1		
			L	P	L	P	L	P	L	P	
JPT		PRATAMA (Eselon II)			1						1
ADMINISTRASI		ADMINISTRATOR (Eselon III)	1		2		4				7
		PENGAWAS (Eselon IV)			3	2	8	8			21
		PELAKSANA									
	1	ANALIS TATA USAHA						2			2
	2	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN					1				1
	3	ANALIS INDUSTRI					7	2			9
	4	ANALIS KAWASAN INDUSTRI						1			1
	5	ANALIS PERDAGANGAN					1	1			3
	6	ANALIS STANDARISASI DAN TEKNOLOGI INDUSTRI						1			1
	7	ANALIS KIMIA					1				1
	8	ANALIS STANDAR MUTU DAN PERALATAN			1			1			2
	9	ANALIS DATA DAN INFORMASI						1			1
	10	ANALIS MUTU PRODUK						1			1
	11	BENDAHARA PENGELUARAN					1				1
	12	BENDAHARA PENERIMAAN								1	1
	13	FASILITATOR PERDAGANGAN			1		2				3
	14	PENATA LAPORAN KEUANGAN						1			1
	15	PENGAWASA BARANG BEREDAR DAN JASA					2	1			3
	16	PENGELOLA DISTRIBUSI DAN PEMASARAN								2	2
	17	PENGELOLA PENGAWASAN							1		1
	18	PENGELOLA KEPEGAWAIAN							1		1
	19	PENGELOLA LABORATORIUM								1	
	20	PENGADMINISTRASI KEUANGAN								1	1
	21	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA								1	1
	22	PRANATA LAPORAN KEUANGAN								1	1
	23	PENGADMINISTRASI PENGUJIAN								1	1
	24	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM								1	1
	25	PENGADMINISTRASI UMUM							4	1	5
	26	PENGADMINISTRASI PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN AKSES PASAR							1		1
	27	VERIFIKATOR DATA LAPORAN KEUANGAN								1	1
	28	ARSIPARIS PELAKSANA								1	1
	29	PRANATA HUMAS AHLI PERTAMA					1				1

	30	PENGUJI MUTU BARANG AHLI PERTAMA					2				2
	31	PENGUJI MUTU BARANG MAHIR					2				2
	32	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN								1	1
	33	PENGUJI MUTU BARANG TERAMPIL PELAKSANA								1	1
	34	PENGUJI MUTU BARANG PELAKSANA PEMULA							1		1
	35	PENYULUH PERINDAG AHLI MUDA			1	1	1	2			5
	36	PENYULUH PERINDAG AHLI PERTAMA						1			1
	37	PENYULUH PERINDAK PELAKSANA LANJUTAN							1	1	2
	38	PERENCANA AHLI PERTAMA					1				1
	39	STATISTISI PENYELIA					1				1

2.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.2 Rekapitulasi Buku Inventaris Milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2016

No.	Bidang Barang	NERACA (Per 31 Des.2016)	BUKU INVENTARIS (Per 31 Des.2016)	Selisih
I	POSISI BMD DALAM NERACA (A + B)	Rp 13.214.139.438	Rp 13.214.139.438	Rp
A	ASET LANCAR	Rp -	Rp -	Rp
A.1	Persediaan	Rp -	Rp -	Rp
B	ASET TETAP (B.1+.....+ B.6 - B.7)	Rp 12.612.950.438	Rp 12.612.950.438	Rp
B.1	Tanah	Rp -	Rp -	Rp
B.2	Peralatan & Mesin	Rp 10.385.940.005	Rp 10.385.940.005	Rp
B.2.1	Alat-alat besar	Rp -	Rp -	Rp
B.2.2	Alat-alat Angkutan	Rp 1.008.558.000	Rp 1.008.558.000	Rp
B.2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp 2.636.959.430	Rp 2.636.959.430	Rp
B.2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	Rp 600.000	Rp 600.000	Rp
B.2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 2.420.095.350	Rp 2.420.095.350	Rp
B.2.6	Alat-alat Studio dan Komunikasi	Rp 162.313.000	Rp 162.313.000	Rp
B.2.7	Alat-alat Kedokteran	Rp 110.000.000	Rp 110.000.000	Rp
B.2.8	Alat-alat Laboratorium	Rp 4.047.414.225	Rp 4.047.414.225	Rp
B.2.9	Alat-alat Keamanan	Rp -	Rp -	Rp

B.3	Gedung dan Bangunan	Rp	8.067.612.232	Rp	8.067.612.232	Rp
B.3.1	Bangunan Gedung	Rp	8.067.612.232	Rp	8.067.612.232	Rp
B.3.2	Bangunan Menumen	Rp	-	Rp	-	Rp
B.4	Jalan, Irigasi & Jaringan	Rp	166.400.000	Rp	166.400.000	Rp
B.4.1	Jalan dan Jembatan	Rp	-	Rp	-	Rp
B.4.2	Bangunan Air/Irigasi	Rp	-	Rp	-	Rp
B.4.3	Instalasi	Rp	166.400.000	Rp	166.400.000	Rp
B.4.4	Jaringan	Rp	-	Rp	-	Rp
B.5	Asset Tetap Lainnya	Rp	450.000	Rp	450.000	Rp
B.5.1	Buku Perpustakaan	Rp	450.000	Rp	450.000	Rp
B.5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	Rp	-	Rp	-	Rp
B.5.3	Hewan Ternak dan Tumbuhan	Rp	-	Rp	-	Rp
B.5.4	Lain-lain	Rp	-	Rp	-	Rp
B.6	Konstruksi dlm pengerjaan	Rp	-	Rp	-	Rp
B.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp	6.007.451.799	Rp	6.007.451.799	Rp
C	ASET LAINNYA	Rp	601.189.000	Rp	601.189.000	Rp
C.1	Aset Tak Berwujud	Rp	-	Rp	-	Rp
C.2	Aset Lain-lain	Rp	601.189.000	Rp	601.189.000	Rp
II	BMD NON NERACA	Rp	32.164.000	Rp	32.164.000	Rp
A	BMD EKSTRAKOMPTABEL	Rp	32.164.000	Rp	32.164.000	Rp
	TOTAL (I + II)	Rp	13.246.303.438	Rp	13.246.303.438	Rp

2.3. Kinerja Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan

Kinerja pelayanan ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan sasaran / target renstra Dinas Perhubungan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan /atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Berdasarkan capaian indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama 5 tahun (mulai dari tahun 2017 sampai dengantahun 2020). Adapun penyajian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Renstra Tahun ke					Rasio Capaian Renstra pada Tahun ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase pertumbuhan industri sektor Pertanian (%)				10	10	10	10	10	17									
	Persentase pertumbuhan industri sektor Kelautan dan Perikanan (%)				5	5	5	5	5	6.65									
	Persentase pertumbuhan industri sektor Pariwisata (%)				2	2	2	2	2										
	Persentase pertumbuhan industri sektor Pertambangan (%				0	0	5	0	5										
	Persentase pertumbuhan tenaga kerja industri (%)				2	2	2	2	2	1									
	Persentase pertumbuhan kawasan industri (%)				0	20	20	20	40	20									
	persentase pertumbuhan industri kawasan Lepar Pongok (%)																		
	persentase pertumbuhan industri kawasan Selat Nasik (%)																		
	persentase pertumbuhan industri kawasan Tanjung Ular (%)																		
	persentase pertumbuhan industri kawasan Sadai (%)																		
	persentase pertumbuhan industri kawasan teluk klabat belinyu (%)																		
	Persentase jumlah industri pangan yang memproduksi sesuai dengan standar kesehatan industri.				15	15	15	15	15										
	Ketersediaan barang kebutuhan pokok (persen;komoditi)				100;11	100;11	100;11	100;11	100;11	100;11									
	Terkendalinya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)				<11	<11	<11	<11	<11	10.01									
	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun (sarana dan prasarana)				87	92	94	96	98										
	Nilai Ekspor (Juta US$)				1.162,94	1.186,19	1.203,99	1.222,05	1.240,38	1.770,76									
	Persentase penurunan jumlah pengaduan (%)				5	5	5	5	5	92,5									
	Peningkatan nilai retribusi Sektor Pertanian (%)				80	10	5	5	5										
	Peningkatan nilai retribusi Sektor Pertambangan (%)				0	5	45	45	45										
	Persentase Tingkat Pelayanan				100	100	100	100	100	100									

	Persentase Peningkatan Industri (%)					5	5	5	5		5								
	Nilai Investasi Industri (Rp)					9.157.209.890	14.157.209.890	16.157.209.890	17.157.209.890		49.608.063								
	Persentase Tenaga Kerja Industri					0.82	1.37	1.58	1.68		5,58								
	Stabilitas Harga Kebutuhan Barang Pokok dan Penting					<2.5%	<2.5%	<2.5%	<2.5%		<2.5%								
	Persentase Ketersediaan Sarana Perdagangan					1.15	1.15	1.15	1.15		0								
	Nilai Ekspor (Juta US$)					1.668.488.999,16	1.835.337.899,07	2.018.871.688,98	2.220.758.857,88		1.393,30								
	Terkendalinya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)					<11	<11	<11	<11		8,23								
	Kenaikan Indeks Keberdayaan Konsumen dan Persentase Ketaatan Pelaku Usaha					37 ; 17,5%	40 ; 28,5%	45 ; 39%	50 ; 50 %		37 ; 17,5%								
	Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas					35%	57%	78%	100%		35%								
	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen					2	3	5	5		2								
	Penerimaan Retribusi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang					275.000.000	300.000.000	325.000.000	350.000.000		138.835.000								
	Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang					146	10	10	10		133,56								
	Persentase Tingkat Pelayanan (%)					100	100	100	100		100								

Tabel 2.3.2

Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome / Output	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Renstra Tahun ke					Rasio Capaian Renstra pada Tahun ke				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	1. Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	100	100	100	100	100	100	100								
		2. Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (Ket: AA=6 A=5 BB=4 B=3 CC=2 C=1)	3	3	3	4	4	4	4								
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan (orang)	132	132	132	132	132	132	132								
	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan (orang)	132	132	132	132	132	132	132								
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (orang)	39	39	39	39	39	8	10								
	Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Pegawai (orang)	134	134	0	0	134	134	0								
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% (dokumen)	2	2	2	2	3	2	2								
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah dengan Realisasi Target diatas 90% (Jenis Dokumen)	5	5	5	5	5	5	5								
2	Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri	1. Persentase Tenaga Kerja Industri pada Sektor Pertanian (%)	10,13%	10,28%	10,44%	10,58%	10,73%	15,60	10,28%								
		2. Persentase Tenaga kerja industri terhadap total tenaga kerja	5,10%	5,17%	5,24%	5,31%	5,38%	5,9	5,17%								
		3. Persentase Tenaga Kerja yang terserap di Industri Kelautan dan Perikanaan	0,68%	0,70%	0,71%	0,72%	0,74%	2,2	0,70%								
		4. Persentase Tenaga Kerja yang terserap di industri pariwisata	0,31%	0,32%	0,33%	0,35%	0,38%	0,3	0,32%								
		5. Persentase Tenaga Kerja yang terserap di bidang industri turunan sumber daya mineral;	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%		1,04%								

		6. Pertumbuhan industri turunaan Potensi Sumber Daya Mineral yang dikembangkan	4	4	5	5	5	4	4									
		7. Persentase Produk Industri Olahan Pangan yang memiliki informasi nutrisi	2,96	4,68	6,71	9,02	11,61	0,82	4,68									
	Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri	1. Persentase Produk Industri yang Berdaya Saing		20	20	20	20		20									
		2. Persentase Tenaga Kerja Sektor Industri		20	20	20	20		20									
	Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Pelaku Industri oleh PFPP	jumlah pelaku industri (pelaku industri)	210	324	354	384	414	210										
	Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan	Jumlah SDM yang terlatih	180	100	100	100	0	125	80									
	Kegiatan Inkubator Wirausaha Baru	Jumlah Kelompok (Kelompok)	1	3	4	5	6	0										
	Kegiatan Peningkatan Daya Saing Produk Industri	Jumlah Pelaku industri yang terfasilitasi (pelaku industri)	610	710	810	910	1010	610	700									
	Kegiatan Rumah Pengembangan Produk	jumlah pelaku industri yang terfasilitasi (pelaku Industri)	400	430	450	480	520	400	400									
	Kegiatan Lomba Industri Kreatif	Jumlah Produk Kreatif (produk)	21	30	35	35	35	21	30									
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan OVOP	jumlah ovop	3	9	9	11	11	3	9									
	Kegiatan Promosi/Gelar Produk Industri	jumlah event (event)	9	9	9	9	9	20	15									
	Kegiatan Pemberdayaan Dekranasda	Jumlah Pelaku Industri/masyarakat	500	500	500	500	500	500	500									
	Kegiatan Seminar Halal	Jumlah Peserta (orang)	100	100	100	100	100	100										
	Kegiatan Fasilitasi Teknologi Industri	Jumlah Website (website)	0	1	1	1	1	0										
	Kegiatan Pemetaan dan Penetapan SDA industri pertanian	Jumlah dokumen SDA industri pertanian (dokumen) (Dokumen)	0	1	0	0	0	0										
	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknologi Tepat Guna produk olahan berbasis Sumber Daya Loka	Jumlah teknologi Tepat Guna (TTG)	0	3	4	4	0	0										
	Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM industri sektor kelautan dan perikanan melalui pelatihan	Jumlah SDM yang terlatih (peserta)	0	20	20	20	20	0										
	Kegiatan Pemetaan dan penetapan SDA industri Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen SDA industri kelautan dan perikanan (dokumen)	0	1	0	0	0	0										
	Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Kawasan Wisata melalui Pelatihan	Jumlah SDM terlatih (peserta)	0	10	15	15	0	0										
	Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM industri turunan pertambangan melalui Pelatihan	Jumlah SDM terlatih (peserta)	0	0	15	0	0	0										

	Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM industri turunan sumber daya mineral melalui pelatihan/pendampingan	Jumlah SDM terlatih (peserta)	0	15	0	20	0	0										
	Kegiatan Pemetaan dan penetapan SDA industri pertambangan timah	Junlah dokumen SDA industri pertambangan timah (dokumen)	0	1	0	1	0	0										
	Kegiatan Fasilitasi magang SDM pelaku industri	Jumlah pelaku industri yang terfasilitasi (pelaku industri)	0	5	5	5	0	0										
	Kegiatan Visualisasi pengembangan industri melalui media elektronik	Jumlah program/ pelaku industri (program/pelaku industri)	0	52	52	52	52	0										
	Kegiatan Peningkatan kerja sama dan perluasan akses industri	Jumlah dokumen (dokumen	0	1	1	1	1	0										
	Kegiatan Sosialisasi, fasilitasi dan digitalisasi industri	umlah peserta (pelaku industri)	0	20	20	20	20	0										
	Kegiatan Monitoring dan evaluasi perkembangan SDM Industri	Jumlah dokumen (dokumen laporan)	0	0	0	0	1	0										
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDA	Jumlah dokumen (dokumen)	0	0	0	0	1	0										
	Kegiatan Fasilitasi Uji Nutrisi	Jumlah SDM yang terlatih (Pelaku industri/masyarakat)	0	120	140	160	180	0	120									
3	Program Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri	1. Persentase industri yang memenuhi standar	15	15	15	15	15	15										
		2. Pertumbuhan Jumlah Industri perikanaan dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok																
		3. Pertumbuhan Jumlah Industri perikanaan dikawasan Strategis Etalase Perikanaan Selat Nasik																
		4. Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan Industri Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	0	1	1	1	1											
		5. Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan strategis Industri Sadai	0	1	1	1	1											
		6. Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan strategis Industri Perikanaan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu																
		7. Pertumbuhan Industri/Sentra/Kawasan Industri	0	1	1	1	0	1										
	Program Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri	1. Persentase Kawasan Industri dan SIKIM		0 ; 14	25 ; 28	25 ; 28	25 ; 14		14									
	Kegiatan Finalisasi RPIP	Jumlah Dokumen yang tersususn (Dokumen)	1	0	0	0	0	1										
	Kegiatan Peningkatan Pengembangan Pembangunan Kawasan Strategis	Jumlah Dokumen tesususun (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1									

	Kegiatan Pengembangan Kawasan stategis/kawasan industri/sentra	Jumlah Dokumen yang Tersususun (Dokumen)	1	1	1	1	1											
	Kegiatan Monev Kawasan Strategis/kawasan industri/sentra	Jumlah Dokumen yang tersususun (dokumen)	0	1	1	1	1											
	Kegiatan Pembinaan Kawasan Strategis/kawasan industri/sentra	Jumlah Lokasi Pembinaan (Lokasi)	0	2	2	2	2		1									
	Kegiatan Penyusunan Profil Kawasan Strategis/kawasan Industri/sentra	Jumlah Profil yang tersusun (buku)	0	1	1	1	1											
	Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Pembentukan Sentra Industri	Jumlah Lokasi Pembinaan dan Penyuluhan Pembentukan Sentra Industri (lokasi)	1	2	2	2	2	1	2									
	Kegiatan Pendataan Perizinan Industri	Jumlah Buku yang disusun (buku)	0	1	1	1	1		1									
	Kegiatan Sistem Informasi Industri Provinsi (SIIProv)	Jumlah Industri Besar dan SIKIM yang teregistrasi (unit)	1	1	1	1	1	3	9									
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Industri	Jumlah Industri yang diawasi (industri)	58	50	50	50	50	58	50									
	Kegiatan Peningkatan Pemahaman Standar Produk Industri	Jumlah Peserta yang memahami standar produk industri (Peserta)	0	85	85	85	85	0	60									
	Kegiatan Peningkatan Pemahaman Pelaku usaha Industri dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan	Jumlah Peserta (Pelaku usaha)	0	50	60	70	80	0										
4	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk	1. Persentase komoditi unggulan daerah diuji yang memenuhi standar pengujiaan	0,68	0,7	0,71	0,72	0,74											
		2. Persentase komoditi unggulan pertanian Daerah diuji yang memenuhi standar pengujian	3	2	2	1	1											
	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk	1. Persentase Peningkatan Komoditi Unggulan Daerah yang diuji		0	33,33	33,33	33,33		18									
	Kegiatan Jejaring Kerjasama AntarLab	jumlah laporan (laporan)		1	1	1	1											
	Kegiatan Pelatihan Teknis Personil Laboratorium UPTD BSPM	Jumlah Personil Terlatih (personil	8	10	12	14	16	8	10									
	Kegiatan Monitoring Mutu Pengujian	Laporan Mutu Komoditi (laporan)	2	1	1	1	1	2	1									
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pemerintah UPTD BSPM	jumlah (pegawai orang)	23	23	23	23	23	23	26									
	Kegiatan Pemeliharaan dan Penambahan Status Akreditasi Laboratorium	Jumlah Lingkup Akreditasi (ruang lingkup)	3	3	4	4	5	2	2									
	Kegiatan Pembelian Alat Laboratorium UPTD BSPM	jumlah alat (unit)	0	5	10	10	15											

	Kegiatan Sosialisasi Mutu Produk Unggulan Daerah	jumlah peserta (peserta)	0	50	50	50	50		200									
5	Program Pengembangan Perdagangan	1. Persentase Rumah Tangga Miskin yang bekerja di sektor Perdagangan	10%	10%	10%	10%	10%											
		2. Persentase Pemantauan dan Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan Pokok)																
		3. Persentase jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan pokok) yang tersedia setiap waktu	73	83	89	95	100											
		4. Persentase peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun	0	63	12	0	25											
		5. Persentase Pertumbuhan nilai omset yang memanfaatkan resi gudang	0	20	40	20	20											
		6. Pertumbuhan komoditi yang terjual melalui Pasar Lelang	0	1	1	1	1											
		7. Persentase Pertumbuhan jumlah volume ekspor (ton)	860.000	862.000	862.000	863.000	870.000	1%										
	Program Pengembangan Perdagangan	1. Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang dibangun (%)		1.15	1.15	1.15	1.15		0									
		2. Pertumbuhan Jumlah Volume Ekspor (Ton)		391.321,67	430.453,83	473.499,22	520.849,14		619.141,19									
		3. Persentase Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Tersedia Setiap Waktu		11 : 100	11 : 100	11 : 100	11 : 100		11 : 100									
	Kegiatan Pelaksanaan Pasar murah	Jumlah pelaksanaan (kali)	30	45	55	65	75	30	41									
	Kegiatan Operasi Pasar Murah	Jumlah Masyarakat (KK)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0										
	Kegiatan Verifikasi dan Pengawasan Perdagangan Sumber Daya Mineral	Jumlah Pelaku usaha (Pelaku Usaha)	40	45	50	55	60	22	37									
	Kegiatan Pengadaan lahan dan Pembangunan PUJASERA	jumlah lahan yang dibebaskan (lahan)	3	4	1	2	2	0										
	Kegiatan Perencanaan dan Pengelolaan Sistem Resi Gudang	Jumlah gudang diadakan, gudang terbangun dan sistem resi gudang yang dijalankan/terkelola (bangunan dan sistem resi gudang)	4	3	4	1	1	2	1									
	Kegiatan Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha (Pelaku Usaha)	40	50	60	70	80	40	40									
	Kegiatan Peningkatan dan perluasan akses pasar	Jumlah keikutsertaan (Kali)	2	10	15	20	25	0	3									

	Kegiatan Peningkatan kemampuan SDM Perdagangan dan Produk	Jumlah orang (Orang)	160	200	190	200	210	170										
	Kegiatan Informasi perdagangan dalam negeri	Tersedianya data informasi harga barang pokok dan barang penting lainnya (komoditi)	0	20	20	20	20		20									
	Kegiatan Partisipasi Pepper Day	Terlaksananya kegiatan partisipasi (org)	200	200	200	200	200	200	17									
	Kegiatan Peningkatan kompetensi pelaku usaha sektor perikanan	Jumlah Pelaku usaha (Pelaku usaha)	30	40	50	60	70	30										
	Kegiatan Peningkatan pemahaman penggunaan produk dalam negeri	jumlah peserta (Pelaku usaha)	0	55	60	65	70											
	Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditi	Jumlah penyelenggaraan (kali)	0	3	3	3	3											
	Kegiatan Pengadaan Gerobak	Jumlah gerobak (unit)	0	20	20	20	20											
	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Pengelola Resi Gudang	Jumlah orang (orang)	0	10	12	15	17		10									
6	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian	1. Persentase jumlah Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga yang diawasi sesuai standar (112 barang SNI wajib; 140 pelaku usaha Tertib Niaga)	10	14	18	27	31	10										
		2. Indeks Keberdayaan Konsumen (0 - 20 = Tahu; 21 - 40 = Paham)	20	22	25	29	34	43										
		3. Persentase jumlah Standarisasi Lab. Kemetrologian yang memenuhi standar	10	20	50	80	100	0										
	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian	1. Persentase Barang Beredar dan Jasa yang Diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan (112 barang SNI wajib) ; Pelaku Usaha yang diawasi (140 pelaku usaha perdagangan)		14 ; 20	18 ; 25	27 ; 35	31 ; 42		14 ; 26										
		2. Jumlah Standarisasi Lab. Kemetrologian yang memenuhi standar		1	2	2	1		0									
		3. Indek Keberdayaan Konsumen (0-20 = Sadar; 21-40 = Paham; 41-60 = Mampu; 61-80 = Kritis; 81-100 = Berdaya)		37	40	45	50		43,34									
	Kegiatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Jumlah barang dan jasa (barang dan jasa)	10	10	10	10	10	10	10									
	Kegiatan Tim KoordinasimBadan Penyelenggaraan Sengketa Konsumen (BPSK)	Jumlah Kabupaten/Kota (Kab/Kota)	7	7	7	7	7	7										
	Kegiatan Peringatan Hari Konsumen Nasional	jumlah Peserta (orang)	500	250	250	250	250	500										
	Kegiatan Survey Pengukuran Indeks Keberdayaan Konsumen	jumlah Konsumen (orang)	400	400	400	400	400	400	400									
	Kegiatan Pos Layanan Pengeaduan Konsumen	jumlah pengaduan konsumen (pengaduan)	0	36	34	32	32		36									

	Kegiatan Penyediaan Informasi dan Publikasi Standarisasi dari Kemetrologian	Jumlah sarana/media informasi (sarana/media)	0	1	1	2	1												
	Kegiatan Monitoring Pelayanan Kemetrologian Legal	Laporan monitoring (dokumen)	0	1	1	1	1												
	Kegiatan Sosialisasi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen	jumlah peserta (orang)	130	100	600	400	600		100										
	Kegiatan Pengembangan SDM dalam rangka pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga	Pelaku usaha dan instansi terkait (Pelaku Usaha)	0	150	310	310	310												
	Kegiatan Peningkatan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pengawasan barang beredar dan jasa serta tertib niaga	Laporan Rapat dan Koordinasi (dokumen)	0	2	6	8	8												
	Kegiatan Pelaksanaan Penentuan penegakan Hukum Pelanggaran dalam rangka Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Tertib Niaga	kasus (kasus)	0	2	3	4	5		0										
	Kegiatan Pemetaan Produk Dalam Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Tertib Niaga	informasi atau data yang teridentifikasi (jenis barang dan jasa)	0	8	14	14	14												
	Kegiatan Pengembangan SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) , Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS Dag) dan Petugas Pengawasn Tertib Niaga (PPTS)	Jumlah PPNS PK, PPBJ, PPNS Dag dan PPTN (orang)	0	13	16	19	22												
	Kegiatan Pengawasan Tertib Niaga	Jumlah pengawasan (kali)	0	14	21	28	35		14										
	Kegiatan Bimbingan Teknis Kelembagaan dan Pemberdyaan Konsumen	Jumlah peserta pelatihan (orang)	0	90	36	106	56												
	Kegiatan Diseminasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen di berbagai media cetak	jumlah media publikasi (media)	0	3	3	3	3												
	Kegiatan Klinik konsumen terpadu bagi pelajar	jumlah sekolah yang dibuka klinik (sekolah)	0	4	4	4	4												
	Kegiatan Forum dialog dengan perguruan tinggi	jumlah peserta forum dialog (orang0	0	100	0	100	0												
	Kegiatan Peningkatan Fungsi BPSK	jumlah BPSK (orang0	0	4	5	6	7												
	Kegiatan Penyusunan Daftar Jumlah Jenis dan Massa berlaku standar Ukur	Dokumen Daftar Jumlah jenis dan massa berlaku standar ukur (dokumen)	0	1	1	1	1												
	Kegiatan Kalibrasi Standar Ukur	Jumlah alat yang terkalibrasi (alat)	0	3	3	3	3												
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Lab. Kemetrologian	Jumlah sarana dan prasarana (unit)	0	2	2	2	2												
	Kegiatan Verifikasi dan Interkomparasi standar ukur	Jumlah standar ukur (alat)	0	3	4	5	6												
	Kegiatan Bimbingan Teknis dan Diklat Penguji Mutu dan Pranata Lab	Jumlah Orang (orang)	0	2	2	1	1												

Tabel 2.3.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN DAERAH	11.982.914.830,00	11.982.914.830,00	11.982.914.830,00			11.982.914.830,00	11.982.914.830,00	11.982.914.830,00									
Pendapatan Asli Daerah	275.000.000					110.370.000											
Dana Perimbangan																	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah																	
BELANJA DAERAH																	
Belanja tidak langsung	11.296.620.830,00					10.750.499.242,00											
Belanja langsung	12.035.553.210,00					11.043.425.663,00											
- Belanja pegawai	11.982.914.830,00					11.367.697.742											
- Belanja barang dan jasa	10.747.259.210					9.845.477.163											
- Belanja modal	602.000.000					580.750.000											
PEMBIAYAAN																	
TOTAL	23.332.174.040					21.793.924.905											

Tabel 2.3.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Program / Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	**3.392.130.250**	**5.371.506.400,00**	**3.077.003.500**			**3.210.400.498**	**5.146.505.485,65**										
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	434.135.000	759.800.000,00	434.091.000			411.923.100	682.654.755,65										
Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.579.180.000	4.543.626.400,00	2.262.122.500			2.471.268.898	4.421.649.930,00										
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	78.500.000	20.600.000,00	125.600.000			62.177.600	14.300.000,00										
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	108.690.250	35.230.000,00	198.190.000			86.076.100	22.250.900,00										
Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	45.225.000	12.250.000,00	57.000.000			36.695.800	5.649.900,00										
Peningkatan Disiplin Aparatur	146.400.000					142.259.000											
Program Pengembangan Perdagangan	**2.282.875.500**	**1.033.662.000,00**	**3.279.140.080**			**2.047.403.519**	**759.266.997,00**										
Pelaksanaan pasar Murah	300.192.000	222.865.000,00	353.708.000			282.206.600	181.285.000,00										
Verifikasi dan Pengawasan Perdagangan Sumber Daya Mineral	207.539.500	12.280.000,00	148.725.000			147.969.122	11.795.050,00										
Perencanaan dan Pengelolaan Sistem Resi Gudang	1.165.770.000	400.000.000,00				1.102.121.827	310.826.866,00										
Pembinaan monitoring dan Evaluasi Pelaku Usaha	80.260.000	33.570.000,00	80.262.000			58.353.000	19.545.000,00										
Peningkatan kemampuan SDM Perdagangan dan Produk	129.778.000		292.720.000			120.834.700											
Partisipasi Pepper Day	346.526.000	7.200.000,00				294.802.870	4.855.450,00										

Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha Sektor Perikanan	52.810.000					41.115.400											
Peningkatan dan Perluasan Akses Pasar		202.802.000,00	2.080.650.080				176.744.631,00										
informasi Perdagangan Dalam Negeri		32.665.000,00	229.325.000				25.120.000,00										
Peningkatan Kemampuan Pengelola Resi Gudang		122.280.000,00	93.750.000				29.095.000,00										
Program Pengembangan Wilayah dan Pegawasan Industri	**507.450.960**	**114.060.000,00**	**612.810.000**			**410.696.620**	**86.797.500,00**										
Peningkatan Pengembangan Pembangunan Kawasan Strategis	49.419.960	23.095.000,00				48.748.960	22.710.000,00										
Finalisasi RPIP	216.234.000					177.133.901											
Sistem Informasi Industri Provinsi (SIIProv)	125.235.000	7.850.000,00				80.761.700	350.000,00										
Pembinaan dan Penyuluhan Pembentukan Sentra Industri	45.300.000	28.570.000,00				33.336.342	20.346.000,00										
Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Industri	71.262.000	4.830.000,00	105.050.000			70.715.717	4.529.000,00										
Peningkatan Pemahaman Standar Produk Industri		42.715.000,00					31.962.500,00										
Pendataan Perizinan		7.000.000,00	101.320.000				6.900.000,00										
Pengembangan Kawasan Strategis/Kawasan Industri/Sentra			275.200.000														
Pembinaan Kawasan Strategis/Kawasan Industri/Sentra			131.240.000														
Program Pengembangan Sumber Daya Fasilitasi dan Akses Industri	**4.001.160.500**	**2.808.198.300,00**	**3.863.015.000**			**3.670.077.370**	**2.545.129.361,00**										
Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan	576.344.000	256.760.000,00	554.950.000			532.369.310	234.154.200,00										
Peningkatan Daya Saing Produk Industri	669.109.000	523.199.900,00	418.365.000			585.721.580	487.478.200,00										
Pemberdayaan Dekranasda	739.785.000	786.115.000,00	951.475.000			711.829.081	740.612.291,00										
Rumah Pengembangan Produk	190.124.000	315.250.000,00	1.615.570.000			188.563.800	226.195.620,00										

Penyuluhan dan Pendampingan Pelaku Industri oleh PFPP	143.165.000					136.521.100											
Seminar Halal Internasional	156.595.000					115.072.454											
Lomba Industri Kreatif	81.633.500	59.995.000,00				54.743.200	49.350.300,00										
Promosi/Gelar Produk Industri	1.389.264.000	719.913.500,00				1.292.815.845	668.657.550,00										
Pembinaan dan Pengembangan OVOP	55.141.000	61.575.000,00	92.475.000			52.441.000	53.754.400,00										
Fasilitasi Uji Nutrisi		85.389.900,00					84.926.800,00										
Peningkatan Kemampuan Teknologi Tepat Guna Produk Olahan Berbasis Sumber Daya Lokal			230.180.000														
Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian	**1.040.424.000**	**235.155.000,00**	**888.540.000**			**1.012.690.088**	**192.540.400,00**										
Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	258.193.000	28.700.000,00	210.140.000			249.095.740	22.899.000,00										
Peringatan Hari Konsumen Nasional	640.072.000					621.867.658											
Tim Koordinasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	84.588.000		116.875.000			84.333.690											
Survey Pengukuran Indeks Keberdayaan Konsumen	57.571.000	47.025.000,00	80.850.000			57.393.000	44.942.200,00										
Sosialisasi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen		74.590.000,00	81.280.000				69.496.800,00										
Pos Layanan Pengaduan Konsumen		42.180.000,00	199.370.000				41.579.400,00										
Pelaksanaan Penentuan Penegakan Hukum Pelanggaran Dalam Rangka Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Tertib Niaga		30.960.000,00	83.850.000				4.625.000,00										
Pengawasan Tertib Niaga		11.700.000,00	116.175.000				8.998.000,00										
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk	**811.512.000**	**1.687.769.000,00**	**3.114.760.000**			**692.157.568**	**1.123.124.826,17**										

Peningkatan Pelayanan Pemerintah UPTD BSPM	593.259.000	1.344.569.000,00	640.520.000			490.692.038	854.642.776,17										
Pemeliharaan dan Penambahan Status Akreditasi Laboratorium	74.580.000	32.050.000,00	270.270.000			66.654.410	16.726.400,00										
Monitoring Mutu Pengujian	94.803.000	89.350.000,00	97.720.000			87.672.720	73.623.150,00										
Pelatihan Teknis Personil Laboratorium UPTD BSPM	48.870.000	32.000.000,00				47.138.400	28.400.000,00										
Sosialisasi Mutu Produk Unggulan Daerah		189.800.000,00					149.732.500,00										
Penyediaan Peralatan Uji Mutu Barang di BPSMB (DAK)			2.106.250.000					Dihapus									

B A B III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Pada tahap perumusan isu-isu strategis, hanya permasalahan permasalahan pembangunan prioritas yang menjadi agenda utama dalam rencana pembangunan daerah untuk 2 (dua) tahun kedepan berdasarkan pemetaan urusan sesuai Peraturan Kemendagri Nomor 90 Tahun 2019. Berikut ini adalah permasalahan bidang industri dan perdagangan:

A. Urusan Industri

1) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
   - Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) ada yang masih bersifat individu/perorangan/petani langsung. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Nomor 14 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi Dan Pengawasan Bahan Berbahaya, bahwa "Pengguna Akhir Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat PA-B2 adalah perusahaan industri yang menggunakan B2 sebagai bahan baku/penolong untuk memperoleh nilai tambah, dan/atau badan usaha atau lembaga yang menggunakan bahan berbahaya sebagai bahan penolong dan/atau penelitian sesuai peruntukannya, memiliki izin dari instansi yang berwenang, dan tidak bergerak di bidang pengolahan pangan.
   - Tidak adanya laporan tertulis dari Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2) tentang realisasi perdagangan bahan berbahaya kepada Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2).
   - Masih kurang intensifnya koordinasi dan mekanisme antar lembaga pengawas didaerah terhadap perdagangan Bahan Berbahaya (B2).

2) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
   - Adanya kelangkaan pasokan beberapa barang kebutuhan pokok dan barang penting ditengah meningkatnya jumlah permintaan.
   - Kenaikan harga beberapa barang kebutuhan pokok dan barang penting ditengah meningkatnya jumlah permintaan.

- Masih kurang intensifnya koordinasi dan mekanisme antara instansi terkait di pemerintahan Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pemantauan dan pengawasan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- Adanya kelangkaan pasokan pupuk bersubsidi dan terlambatnya distribusi pupuk.
- Kurangnya informasi data jumlah pasokan pupuk subsidi dan data penerima/petani pengguna pupuk subsidi.

3) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
   - Masih rendahnya Indeks Keberdayaan Konsumen dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya sosialisasi tentang undang-undang perlindungan konsumen, hak advokasi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen serta rendahnya perilaku komplain atau mengungkapkan keluhan dikalangan konsumen agar produsen dapat memberikan pelayanan produk yang sesuai aturan.
   - Pada layanan terstandarisasi terdapat permasalahan:
     - Lingkup Layanan pengujian dan sertifikasi yang masih sangat terbatas dikarenakan ketersediaan peralatan untuk pengembangan layanan terstandardisasi sangat terbatas
     - Sinkronisasi regulasi pusat dan daerah yang belum maksimal untuk pemanfaatan layanan laboratorium pengujian didaerah
     - Layanan pengujian sangat tergantung dengan jumlah produksi komoditi daerah

4) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
   - Kesulitan dalam mengontrol operasional in-out barang atau produk di tengah-tengah transaksi yang bersifat besar dan cepat.
   - Kesulitan untuk menentukan efisiensi transportasi yang nantinya akan digunakan dalam pengiriman barang atau produk hasil produksi.
   - Kesulitan dengan jarak yang relatif jauh antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam menjalankan proses distribusi suatu produk atau barang. Jarak bisa saja menjadi salah satu permasalahan yang biasa terjadi di dalam proses distribusi barang dagangan dikarenakan faktor jarak atau lamanya waktu tempuh bisa mengakibatkan kerusakan pada

barang -yang mengakibatkan kualitas barang menjadi turun- pada saat barang dalam proses perjalanan ke tempat tujuan.

- Masih kurang intensifnya koordinasi dan mekanisme antara instansi terkait di pemerintahan Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pemantauan dan pengawasan distribusi barang.

5) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
   - Belum Optimalnya pemasaran produk-produk lokal pada pasar lokal maupun luar daerah.
   - Penjelasannya :
     - Terbatasnya sarana dan prasarana perdagangan dalam pemasaran dan promosi,
     - Rendahnya kualitas dan daya saing produk daerah yang berorientasi nasional
     - Kurangnya kreativitas,kapasitas dan kompetensi UMKM terhadap produk dalam negeri

6) Program Pengembangan Ekspor
   - Adanya produk ekspor yg tidak tercatat di pabean Pangkalpinang
   - Belum adanya pelabuhan ekspor yg layak;
   - Turunnya harga komoditas;
   - Belum maksimalnya diversifikasi produk ekspor;
   - Belum maksimalnya akses pasar ekspor;
   - asih rendahnya kapasitas SDM dan produk ekspor;
   - Tingginya biaya pengiriman produk ekspor.
   - Penyebab penurunan ekspor non migas tahun 2018 dan 2019
     - Target nilai ekspor produk non migas pada tahun 2018 sebesar 1 700, sementara realisasi ekspor non migas tahun 2018 sebesar (USD juta) 1 563. Hal tersebut disebabkan turunnya jumlah ekspor komoditi timah karena adanya surat edaran bersama ICDX dan ICH tentang pencabutan kewenangan surveyor Indonesia dalam memverifikasi asal usul biji timah. Produksi yang telah di verifikasi oleh lembaga survei tersebut tidak dapat di ekspor.
     - Target nilai ekspor produk non migas pada tahun 2019 sebesar 1 800, sementara realisasi ekspor non migas tahun 2019 sebesar (USD juta) 1 294. Hal tersebut disebabkan karena adanya syarat CPI (competent

person of Indonesia) dalam pengajuan RKAB (Rencana Kegiatan Anggaran Belanja) dan hanya ada empat perusahaan yang memenuhi persyaratan tersebut.

7) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
   - Industri paling banyak ditemukan di Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kota Pangkalpinang. Jumlah Industri Kecil 15.108 Unit, sedangkan Industri Sedang berjumlah 106 Unit dan Industri Besar sebesar 98 Unit secara total terdapat 15.312 Unit dengan total tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 52.043 orang. Persentase pertumbuhan jumlah industri tercatat 18.36 % dari tahun sebelumnya
   - Pada tahun 2019, Jumlah Industri Kecil 17.024 Unit, sedangkan Industri Sedang berjumlah 99 Unit dan Industri Besar sebesar 88 Unit secara total terdapat 17.211 Unit dengan total tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 48.327 orang. Persentase pertumbuhan jumlah industri tercatat 12.40 % dari tahun sebelumnya. Untuk 88 Industri Besar di Provinsi Kep. Bangka Belitung yang menyerap 8.323 tenaga kerja.
   - Sekitar 40% Industri Besar dan Sedang ini merupakan Industri yang bergerak di sektor makanan, 23% persen Industri Logam Dasar, dan 15 % Industri Barang Galian Bukan Logam.
   - Pada tahun 2020, Jumlah Industri Kecil 18.607 Unit, sedangkan Industri Sedang berjumlah 100 Unit dan Industri Besar sebesar 88 Unit dan secara total terdapat 18.795 Unit dengan total tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 50.553 orang. Persentase pertumbuhan jumlah industri tercatat 9.20 % dari tahun sebelumnya. Ada tercatat 88 industri besar dan sedang di Provinsi Kep. Bangka Belitung yang menyerap 8.318 tenaga kerja.
   - Untuk tahun 2021, diasumsikan akan terjadi penurunan jumlah unit usaha untuk sektor industri karena seluruh sendi ekonomi Babel tertekan akibat pandemi COVID-19. Hal ini membuat persentase pertumbuhan jumlah industri di setting mengalami perlambatan kenaikan hanya 2% saja

8) Program Pengendalian Izin Usaha Industri

- Kepatuhan perusahaan industri dalam penyampaian data dan informasi industri masih rendah.
- Penjelasan : Industri yang sesuai izin usaha industri (IUI) memenuhi 3 aspek, yang salah satunya merupakan penyampaian data dan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian no. 15/2019, untuk penyampaian tersebut perusahaan industri terlebih dahulu harus memiliki akun SIINas,kondisi saat ini baru 30% perusahaan industri yang memiliki akun SIINas,sehingga tingkat kepatuhan perusahaan industri masih rendah terhadap penyampaian data dan informasi.

9) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
   - Kepatuhan Perusahaan Industri/Pelaku Usaha dalam kewajiban memiliki akun SIINas masih rendah, sesuai Peraturan Menteri Perindustrian no. 15/2019 pasal 3 ayat 2" Pelaku Usaha yang memperoleh Perizinan Bemsaha di sektor perindustrian wajib memiliki Akun SIINas".

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Memperhatikan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan tahun 2012- 2017 adalah fokus pembangunan pada tahap ketiga RPJPD Provinsi Kepulauan 2005-2025 difokuskan pada upaya untuk menjaga dan meningkatkan perekonomian daerah serta upaya pemenuhan kapasitas dan kualitas SDM.

Pada tahapan ini, dalam rangka peningkatan perekonomian daerah, perhatian perlu diberikan pada upaya untuk memberikan nilai tambah pada hasil produk unggulan provinsi. Keterkaitan industri ke depan dan ke belakang dapat menjadi perhatian dan tumpuan utama. Sebagai contoh: hasil pertanian ubi, komoditas ini dapat dikembangkan menjadi produk-produk makanan yang berbahan baku utama ubi, dari kelapa sawit selain menghasilkan CPO juga bisa menghasilkan biogas. Demikian juga dengan hasil perikanan laut dapat dikembangkan menjadi produk-produk makanan berbasis hasil produksi tersebut, selain itu dapat diupayakan pengembangan industri-industri pengalengan ikan yang memiliki daya saing ekspor.

Pada akhir tahap ketiga ini, kondisi perekonomian daerah diharapkan dapat terus meningkat, pertumbuhan PDRB sebagai indikator dari kondisi perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditargetkan dapat tumbuh sebesar 5,25 sementara itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengindikasikan tingkat kualitas SDM diharapkan meningkat menjadi 71,05.

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 adalah: "Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi".

Pernyataan visi ini mengandung lima makna yaitu :

1. *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung* adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. *Sejatera* menunjukkan bahwa Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil.
3. *Maju* adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).
4. *Unggul* dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan dukungan semua sektor.
5. *Teknologi* dimaknai Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta untuk pencapaian Visi dan Misi yang Efisien dan Cepat serta berdaya saing berbasis teknologi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017 –2022, yaitu:

1. Pembangunaan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;

2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektifitas derah yang berkualitas;
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia unggul dan handal;
4. Meningkatkan pelayanaan dan kualitas kesehatan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Analisis Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L serta untuk mengidentifikasi apakah sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L.Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitungi adalah Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perdagangan RI.

3.3.1. Renstra Kementerian Perindustrian RI Tahun 2020 – 2024

Kementerian Perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dituntut untuk melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan perindustrian. Tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu "*Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional*".

Penekanan sasaran strategis jangka menengah Kementerian Perindustrian 2020 – 2024. yang terkait dengan tugas-tugas pembangunan yang dilakukan Dinas Prindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders Prespective) Sasaran strategis pertama (SS-1): Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas
2. Perspektif Pelanggan (Customer Perspective) Sasaran strategis kedua (SS2): Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
3. Sasaran strategis ketiga (SS-3): Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri
4. Sasaran strategis keempat (SS-4): Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri

5. Sasaran strategis kelima (SS-5): Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
6. Sasaran strategis keenam (SS-6): Meningkatnya Persebaran Industri
7. Sasaran strategis ketujuh (SS-7): Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif.
8. Sasaran strategis kedelapan (SS-8): Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
9. Sasaran strategis kesembilan (SS-9): Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
10. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10): Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian
11. Sasaran strategis kesebelas (SS-11): Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas
12. Sasaran strategis kesebelas (SS-11): Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas
13. Sasaran strategis kedua belas (SS-12): Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
14. Sasaran strategis ketiga belas (SS-13): Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel

Fokus Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Kementerian Perindustrian berkontribusi dalam Agenda Pembangunan I yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”. Kebijakan pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi akan dilakukan dengan melaksanakan peningkatan nilai tambah ekonomi.

Kementerian Perindustrian juga turut berperan Mengembangkan wilayah untuk dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan 3 yaitu “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Kebijakan pembangunan manusia yang terkait dengan sektor industri diarahkan pada peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

3.3.2. Renstra Kementerian Perdagangan RI Tahun 2020 – 2024

Dalam rangka mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dalam bidang perdagangan luar

negeri, Kementerian Perdagangan menetapkan tujuan peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa adalah *Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa* sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi nasional.

1) Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa
2) Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Stabilisasi Harga Dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok
3) Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Konsumen Berdaya Dan Pelaku Usaha Yang Bertanggung Jawab
4) Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri
5) Sasaran Strategis 5: Optimalnya Peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)
6) Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Kinerja Perdagangan Yang Bersih, Akuntabel Dan Profesional
7) Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Kapabilitas SDM Perdagangan

Maka arah kebijakan Perdagangan dapat dijabarkan menjadi 12 (dua belas) pokok pikiran yaitu:

1) Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor
2) Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional
3) Penguatan Jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok
4) Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok
5) Peningkatan pemberdayaan konsumen
6) Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu, dan tertib ukur
7) Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri
8) Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)
9) Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perdagangan
10) Penguatan Pelayanan Publik yang Prima

11) Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian
12) Pengembangan Kapasitas SDM Berbasis Kompetensi.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2017 -2022 disusun dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022. Seperti yang telah di sampaikan pada BAB 3 sebelumnya bahwa visi daerah 2017-2022 adalah "Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi". Dengan Misi yang di ampuhkan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu Misi 1 - Meningkatkan pembangunaan ekonomi berbasis potensi daerah yang dapat dibgambarkab pada Table 4.1 berikut:

Tabel 4.1.1
Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan Tahun ke-				
			1	2	3	4	5
1.	Menumbuhkembangkan industri Bangka Belitung berbasis potensi daerah	Persentase Pertumbuhan Industri (%)	5	5	5	5	5
2.	Pengendalian inflasi dan efisiensi distribusi perdagangan dalam negeri	idealnya stabilitas harga kebutuhan barang pokok 2-3 % (tingkat kenaikan harga)	< 3	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5
3.	Mengembangkan Kinerja Ekspor	Nilai Ekspor Bersih (Juta US$)	1.162,94	1.186,19	1.203,99	1.222,05	1.240,38
4.	Peningkatan Perlindungan Konsumen	Persentase penurunan Kasus Pengaduan(%)	25	25	50	50	50
5.	Peningkatan PAD	Peningkatan nilai retribusi (%)	80	15	50	50	50
6.	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Tingkat Pelayanan (%)	100	100	100	100	100

	agar terwujud tertib adminstrasi perkantoran						
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Industri	Persentase Peningkatan Industri (%)		5	5	5	5
2.	Pengendalian Stabilitas Harga	Stabilitas Harga Kebutuhan Barang Pokok dan Penting		<2.5%	<2.5%	<2.5%	<2.5%
3.	Peningkatan Keberdayaan Konsumen dan Kepatuhan Pelaku Usaha	Kenaikan Indeks Keberdayaan Konsumen dan Persentase Ketaatan Pelaku Usaha		37 ; 17,5%	40 ; 28,5%	45 ; 39%	50 ; 50 %
4.	Meningkatnya Penerimaan Retribusi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Penerimaan Retribusi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang		275.000.000	300.000.000	325.000.000	350.000.000

Tabel 4.1.2
Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun ke-				
			1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Industri Sektor Pertanian	Persentase pertumbuhan industri sektor Pertanian (%)	10	10	10	10	10
	Meningkatnya Industri Sektor Kelautan dan Perikanan	Persentase pertumbuhan industri sektor Kelautan dan Perikanan (%)	5	5	5	5	5
	Meningkatnya Industri Sektor Pariwisata	Persentase pertumbuhan industri sektor Pariwisata (%)	2	2	2	2	2
	Meningkatnya Industri Sektor Pertambangan	Persentase pertumbuhan industri sektor Pertambangan (%	0	0	5	0	5
	Meningkatnya tenaga Kerja Industri	Persentase pertumbuhan	2	2	2	2	2

		tenaga kerja industri (%)					
	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Industri	Persentase pertumbuhan kawasan industri (%)	0	20	20	20	40
		persentase pertumbuhan industri kawasan Lepar Pongok (%)					
		persentase pertumbuhan industri kawasan Selat Nasik (%)					
		persentase pertumbuhan industri kawasan Tanjung Ular (%)					
		persentase pertumbuhan industri kawasan Sadai (%)					
		persentase pertumbuhan industri kawasan teluk klabat belinyu (%)					
	Meningkatnya Industri pangan yang memproduksi sesuai dengan standar kesehatan industri	Persentase jumlah industri pangan yang memproduksi sesuai dengan standar kesehatan industri.	15	15	15	15	15
2.	Melakukan pengendalian distribusi barang kebutuhan pokok	Ketersediaan barang kebutuhan pokok (persen;komoditi)	100;11	100;11	100;11	100;11	100;11
	Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat	Terkendalinya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)	<11	<11	<11	<11	<11
	Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun (sarana dan prasarana)	87	92	94	96	98

3.	Meningkatnya produk ekspor, eksportir dan terpantaunya produk impor	Nilai Ekspor (Juta US$)	1.162,94	1.186,19	1.203,99	1.222,05	1.240,38
4.	Penurunan Jumlah Pengaduan Konsumen	Persentase penurunan jumlah pengaduan (%)	5	5	5	5	5
5.	Meningkatnya jumlah Penerimaan Retribusi pengujian	Peningkatan nilai retribusi Sektor Pertanian (%)	80	10	5	5	5
		Peningkatan nilai retribusi Sektor Pertambangan (%)	0	5	45	45	45
6.	Meningkatnya sarana dan prasarana, sistem pelaporan dan kompetensi sumber daya aparatur	Persentase Tingkat Pelayanan	100	100	100	100	100
1	Menumbuhkembangkan Industri Berbasis Potensi Daerah	Nilai Investasi Industri (Rp)		9.157.209.890	14.157.209.890	16.157.209.890	17.157.209.890
		Persentase Tenaga Kerja Industri		0.82	1.37	1.58	1.68
2	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Perdagangan	Persentase Ketersediaan Sarana Perdagangan		1.15	1.15	1.15	1.15
3	Meningkatnya Nilai ekspor	Nilai Ekspor (Juta US$)		1.668.488.999,16	1.835.337.899,07	2.018.871.688,98	2.220.758.857,88
4	Meningkatnya Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat	Terkendalinya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)		<11	<11	<11	<11
5	Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha	Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas		35%	57%	78%	100%
6	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen		2	3	5	5
7	Meningkatnya Pengujian dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan		146	10	10	10

		Sertifikasi Mutu Barang					
8	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran agar terwujud tertib adminstrasi perkantoran	Persentase Tingkat Pelayanan (%)		100	100	100	100

4.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sedangkan matriks hubungan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat digambarkan seperti Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.1.2
Hubungan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan RPJMD	**Sasaran RPJMD**	**Indikator Sasaran RPJMD**	**Tujuan Renstra**	**Indikator Tujuan**	**Sasaran Renstra**	**Indikator Sasaran Renstra**
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan pekerbunaan	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunaan	Menumbuhkembangkan industri Bangka Belitung berbasis potensi daerah	Persentase pertumbuhan industri (%)	Meningkatnya Industri Sektor Pertanian	Persentase pertumbuhan industri sektor pertanian (%
			Peningkatan PAD	Peningkatan Nilai Retribusi (%)	Meningkatnya jumlah Penerimaan Retribusi pengujian	Peningkatan Nilai Retribusi sektor pertanian (%
	Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan	Menumbuhkembangkan industri Bangka Belitung berbasis potensi daerah	Persentase pertumbuhan industri (%)	Meningkatnya Industri Sektor Kelautan dan Perikanan	Persentase pertumbuhan industri sektor kelautan dan perikanan (%
					Meningkatnya Pembangunan Kawasan Industri	persentase pertumbuhan industri kawasan Lepar Pongok (%)
						persentase pertumbuhan Industri kawasan Selat Nasik (%)
	Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata	jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara	Menumbuhkembangkan industri Bangka Belitung berbasis potensi daerah	Persentase pertumbuhan industri (%)	Meningkatnya Industri Sektor Pariwisata	Persentase pertumbuhan industri sektor pariwisata (%)
	Meningkatnya Produksi sektor pertambangan	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor	Menumbuhkembangkan industri Bangka Belitung berbasis potensi daerah	Persentase pertumbuhan industri (%)	Meningkatnya Industri Sektor Pertambangan	Persentase pertumbuhan industri sektor

		pertambangan dan penggalian				Pertambangan (%)
			Peningkatan PAD	Peningkatan Nilai Retribusi (%)	Meningkatnya jumlah Penerimaan Retribusi pengujian	Peningkatan Nilai Retribusi Sektor Pertambangan (%)
	Meningkatnya pembangunan berbasis industri	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan	Menumbuhkembangkan industri Bangka Belitung berbasis potensi daerah	Persentase pertumbuhan industri (%)	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Industri	persentase pertumbuhan industri kawasan Tanjung Ular (%)
						persentase pertumbuhan industri kawasan Sadai (%)
						persentase pertumbuhan industri kawasan teluk klabat belinyu (%)
						persentase pertumbuhan kawasan industri (%)
Meningkatnya pendapatan Pemerintah dan masyarakat	Menurunnya angka Pengangguran	Persentase Angka Pengangguran	Menumbuhkembangkan industri Bangka Belitung berbasis potensi daerah	Persentase pertumbuhan industri (%)	Meningkatnya tenaga Kerja Industri	persentase pertumbuhan tenaga kerja industri (%)
	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	Pengendalian inflasi dan efisiensi distribusi perdagangan dalam negeri	idealnya stabilitas harga kebutuhan barang pokok 2-3% (tingkat kenaikan harga)	Melakukan pengendalian distribusi barang kebutuhan pokok	Ketersediaan barang kebutuhan pokok (persen;komoditi)
	Menurunnya angka Inflasi	Angka Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Peningkatan Perlindungan Konsumen	Persentase penurunan kasus pengaduan (%)	Penurunan Jumlah Pengaduan Konsumen	Persentase penurunan jumlah pengaduan (%)
			Mengembangkan kinerja ekspor	Nilai Ekspor Bersih (Juta US$)	Meningkatnya produk ekspor, eksportir dan terpantaunya produk impor	Nilai Ekspor (Juta US$)
			Pengendalian inflasi dan efisiensi distribusi perdagangan dalam negeri	idealnya stabilitas harga kebutuhan barang pokok 2-3% (tingkat	Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat	Terkendalinya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)

				kenaikan harga)	Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun (sarana dan prasarana)
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat	Angka Kesehatan Masyarakat	Menumbuhkembangkan industri Bangka Belitung berbasis potensi daerah	Persentase pertumbuhan industri (%)	Meningkatnya Industri pangan yang memproduksi sesuai dengan standar kesehatan industri	Persentase jumlah industri pangan yang memproduksi sesuai dengan standar kesehatan industri.

Tabel 4.1.3
Hubungan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD menyesuaikan PMDN90

VISI	MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN DISPERINDAG	SASARAN DISPERINDAG	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
Babel Sejahtera, Provinsi Maju,yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi	Meningkatkan Pembangunaan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi				Laju Pertumbuhan Ekonomi
			Meningkatnya nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan			Laju Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan
				Meningkatkan Pertumbuhan Industri Pengolahan dan Perdagangan		Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan
						Persentase Pertumbuhan Perdagangan
					Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Industri	Persentase Pertumbuhan Usaha Industri
					Meningkatnya Neraca Perdagangan	Nilai Neraca Perdagangan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Revisi Renstra ini adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan bagaimana cara Dinas Perindustrian dan Perdagangan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Strategi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagisetiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tabel dibawah ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam dua tahun mendatang.

Tabel 5.1.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

VISI: Babel Sejahtera, Provinsi Maju,yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi

MISI LAMA: Meningkatkan Pembangunaan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah

MISI BARU: Meningkatkan Pembangunaan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah

Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan Tahun				
Lama	Baru	Lama	Baru		I (2018)	II (2019)	III (2020)	IV (2021)	V (2022)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Menumbuhkembangkan industri Bangka Belitung berbasis potensi daerah		Meningkatnya Industri Sektor Pertanian		Menumbuhkembangkan Industri berbasis potensi sumber daya daerah	Mendorong tumbuhnya industri pengolahan berbasis pertanian dan daya saing industri melalui pemanfaatan Teknologi				
				Penguatan Struktur Industri Berbasis kawasan strategis, wilayah dan sumber daya lokal yang berkelanjutan	Mendukung penumbuhan dan pengembangan industri yang memberi nilai tambah komoditi utama potensi daerah melalui pendekatan kewilayaan				
		Meningkatnya Industri Sektor Kelautan dan Perikanan		Menumbuhkembangkan Industri berbasis potensi sumber daya daerah	Mendorong tumbuhnya industri pengolahan berbasis kelautan dan perikanan				
		Meningkatnya Industri Sektor Pariwisata		Menumbuhkembangkan Industri berbasis potensi sumber daya daerah	Mendorong Tumbuhnya industri kreatif, kerajinan dan industri pendukung sektor pariwisata				
		Meningkatnya Industri Sektor Pertambangan		Menumbuhkembangkan Industri berbasis potensi sumber daya daerah	Mendorong tumbuhnya industri pengolahan berbasis mineral hasil tambang				
		Meningkatnya tenaga Kerja Industri		Menumbuhkembangkan Industri berbasis potensi sumber daya daerah	Mendorong penumbuhan, pengembangan dan daya saing industri melalui pendampingan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan teknis, manajerial, promosi industri dan memberikan fasilitasi dan akses terhadap industri				
		Meningkatnya Pembangunan Kawasan Industri		Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan lainnya dalam	Meningkatkan koordinasi kebijakan antara sektor-sektor pembangunan				

				mendukung pembangunan industri daerah dan nasional	lainnya dalam pembangunan industri daerah dan nasional				
				Pemetaan Wilayah dan Penetapan Potensi komoditi Unggulan daerah dan penetapan/pembangunan kawasan strategis industri (KI/KPI/SIKIM)	Road map/ Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP)				
		Meningkatnya Industri pangan yang memproduksi sesuai dengan standar kesehatan industri		Mendorong berkembangnya industri pangan yang sehat dan sesuai standarisasi olahan pangan	Memberikan kemudahan fasilitasi dan akses industri dalam mendapatkan informasi nutrisi olahan pangan				
	Meningkatkan Pertumbuhan Industri		Menumbuhkembangkan Industri Berbasis Potensi Daerah	Menumbuhkembangkan Industri berbasis potensi sumber daya daerah		Mendorong tumbuhnya industri pengolahan berbasis pertanian dan daya saing industri melalui pemanfaatan Teknologi			
						Mendorong tumbuhnya Tenaga Kerja sektor industri pengolahan berbasis kelautan dan perikanan			
						Mendorong Tumbuhnya industri kreatif, kerajinan dan industri pendukung sektor pariwisata dan pengolahan berbasis kelautan dan perikanan			
						Mendorong tumbuhnya industri pengolahan berbasis mineral hasil tambang			
						Mendorong penumbuhan, pengembangan dan daya saing industri melalui pendampingan, pelatihan			

						kewirausahaan, pelatihan teknis, manajerial, promosi industri dan memberikan fasilitasi dan akses terhadap industri			
				Penguatan Struktur Industri Berbasis kawasan strategis, wilayah dan sumber daya lokal yang berkelanjutan		Mendukung penumbuhan dan pengembangan industri yang memberi nilai tambah komoditi utama potensi daerah melalui pendekatan kewilayaan			
				Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan industri daerah dan nasional		Meningkatkan koordinasi kebijakan antara sektor-sektor pembangunan lainnya dalam pembangunan industri daerah dan nasional			
				Pemetaan Wilayah dan Penetapan Potensi komoditi Unggulan daerah dan penetapan/pembangunan kawasan strategis industri (KI/KPI/SIKIM)		Road map/ Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP)			
				Mendorong berkembangnya industri pangan yang sehat dan sesuai standarisasi olahan pangan		Memberikan kemudahan fasilitasi dan akses industri dalam mendapatkan informasi nutrisi olahan pangan			
Pengendalian inflasi dan efisiensi distribusi perdagangan dalam negeri		Melakukan pengendalian distribusi barang kebutuhan pokok		Kelancaran Distribusi Barang Pokok dan Barang Strategis	Memperkuat rantai suplay dan pasokan barang terutama bagi bahan kebutuhan pokok dan barang strategis				
		Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat		Kelancaran Distribusi Barang Pokok dan Barang Strategis	Memperkuat rantai suplay dan pasokan barang terutama bagi bahan kebutuhan pokok dan barang strategis				
				Penataan usaha perdagangan dan pengembangan	Meningkatkan perdagangan antar wilayah/daerah				

				usaha baru					
		Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan		Meningkatkan pembangunan pasar tradisional dan pasar modern menjadi pasar rakyat	Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang serta pengembangan pasar dalam negeri				
Mengembangkan Kinerja Ekspor		Meningkatnya produk ekspor, eksportir dan terpantaunya produk impor		Mempertahankan pasar ekspor yang ada dan mengembangkan pasar baru dengan pelaku dan komoditi ekspor berbasis potensi daerah yang berdaya saing serta upaya mengendalikan impor	Mendorong upaya-upaya perluasan jenis komoditi dan tujuan pasar ekspor yang berkelanjutan ditunjang denganpemantauan dan pengawasan atas impor daerah				
				Mempertahankan pasar ekspor yang ada dan mengembangkan pasar baru dengan pelaku dan komoditi ekspor berbasis potensi daerah yang berdaya saing serta upaya mengendalikan impor	Mendorong upaya-upaya perluasan jenis komoditi dan tujuan pasar ekspor yang berkelanjutan ditunjang denganpemantauan dan pengawasan atas impor daerah				
	Pengendalian Stabilitas Harga		Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan	Meningkatkan pembangunan pasar tradisional dan pasar modern menjadi pasar rakyat		Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang serta pengembangan pasar dalam negeri			
			Meningkatnya Nilai Ekspor	Mempertahankan pasar ekspor yang ada dan mengembangkan pasar baru dengan pelaku dan komoditi ekspor berbasis potensi daerah yang berdaya saing		Mendorong upaya-upaya perluasan jenis komoditi dan tujuan pasar ekspor yang berkelanjutan			
			Meningkatnya pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat	Kelancaran Distribusi Barang Pokok dan Barang Strategis		Memperkuat rantai suplay dan pasokan barang terutama bagi bahan kebutuhan pokok dan barang strategis			
				Penataan usaha perdagangan dan pengembangan usaha baru		Meningkatkan perdagangan antar wilayah/daerah			
Peningkatan Perlindungan Konsumen		Penurunan Jumlah Pengaduan Konsumen		Melaksanakan pembinaan dan pengawasan barang beredar dan jasa serta Tertib Niaga	Peningkatan kesesuaian barang beredar dan Jasa terhadap ketentuan yang berlaku serta pelaku usaha yang memiliki Legalitas				
	Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha yang Sehat		Peningkatan kepatuhan pelaku usaha	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan barang beredar dan jasa serta Tertib Niaga		Peningkatan kesesuaian barang beredar dan Jasa terhadap			

						ketentuan yang berlaku serta pelaku usaha yang memiliki Legalitas			
				Melaksanakan pembinaan dan pengawasan barang beredar (barang ilegal–bahan berbahaya–standar–dumping, dll		Meningkatkan kapasitas pelayanan publik kepada pelaku usaha			
				Menjamin mutu pelayanan tera dantera ulang, kalibrasi alat – alat ukur,takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) Metrologi Legal dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)		mewujudkan lembaga kemetrologian yang memiliki kompetensi teknis dan manajerial yang memperolehpengakuan formal (akreditasi) secara nasional maupun internasional			
Peningkatan PAD		Meningkatnya jumlah Penerimaan Retribusi pengujian		Menambah ruang lingkup pelayanan jasa teknis dan pembinaan standardisasi yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) maupun Badan Akreditasi Internasional	Meningkatkan pelayanan pengujian dan sertifikasi mutu				
				Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah melalui pelayanan sertifikasi dan pengendalian mutu	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan laboratorium pengujian mutu barang ekspor dan impor				
				Membina dan melaksanakan koordinasi dengan PPMB, BSN, PUSTAND dan instansi terkait dalam kegiatan standardisasi dan pengendalian mutu	Menjaga kualitas produk ekspor unggulan Bangka Belitung melalui standardisasi dan manajemen mutu barang ekspor pada perusahaan pelaku ekspor				
	Meningkatnya Penerimaan Retribusi Balai Sertifikasi dan Pengendalian Mutu		Meningkatnya Pengujian dari LABORATORIUM Balai Sertifikasi dan Pengendalian Mutu	Menambah ruang lingkup pelayanan jasa teknis dan pembinaan standardisasi yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) maupun Badan Akreditasi Internasional		Meningkatkan pelayanan pengujian dan sertifikasi mutu			

Misi lama : Meningkatkan kesehatan masyarakat									
Misi Baru : -									
Menumbuhkembangkan industri Bangka Belitung berbasis potensi daerah		Meningkatnya Industri pangan yang memproduksi sesuai dengan standar kesehatan industri		Mendorong berkembangnya industri pangan yang sehat dan sesuai standarisasi olahan pangan	Memberikan kemudahan fasilitasi dan akses industri dalam mendapatkan informasi nutrisi olahan pangan				
	-		-	-		-			
Misi Lama : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi									
Misi Baru : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi									
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran agar terwujud tertib administrasi perkantoran		Meningkatnya sarana dan prasarana, sistem pelaporan dan kompetensi sumber daya aparatur		Meningkatkan pelayanan terhadap aparatur	Meningkatkan pelayanan administrasi pemerinah Meningkatkan kesiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana kantor Meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya aparatur Meningkatkan kesadaran kedisiplinan aparatur Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dengan kesesuaian terhadap dokumen perencanaan daerah.				
	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran agar terwujud tertib administrasi perkantoran		Meningkatnya sarana dan prasarana, sistem pelaporan dan kompetensi sumber daya aparatur	Meningkatkan pelayanan terhadap aparatur		Meningkatkan pelayanan administrasi pemerinah Meningkatkan kesiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana kantor Meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya aparatur			

						Meningkatkan kesadaran kedisiplinan aparatur Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dengan kesesuaian terhadap dokumen perencanaan daerah			

Tabel 5.1.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan menyesuaikan PMDN90
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Visi : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi"					
Misi I : Meningkatkan Pembangunaan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Bidang Urusan	Program
Meningkatkan Pertumbuhan Industri Pengolahan dan Perdagangan	1. Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Industri	Menumbuh-kembangkan industri pengolahan sumberdaya unggulan dengan struktur industri yang kuat dan berdaya saing	Meningkatkan perencanaan dan pengelolaan pembangunan sumber daya dan sarana prasarana industri yang mendukung penguatan industri daerah	PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
		Mengembangkan industri pengolahan dengan kemasan yang terstandarisasi dan berdaya saing global	Meningkatkan mutu, penampilan, nilai jual dan daya saing produk industri pengolahan		
		Menjamin Keberlangsungan Usaha Industri	Pengawasan Industri dengan pendekatan secara persuasif	PERINDUSTRIAN	1. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 2. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

	2. Meningkatnya Neraca Perdagangan	Menjaga stabilitas harga dan ketersedian bahan pokok serta mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri	Menjaga stok Barang Pokok dan Barang Penting dan kelancaran distribusi	PERDAGANGAN	1. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 2. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
		Meningkatkan pengawasan minuman beralkohol toko bebas bea dan bahan berbahaya	Pengawasan dan Pengendalian serta Izin minuman beralkohol toko bebas bea dan bahan berbahaya	PERDAGANGAN	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
		Meningkatkan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Tertib Niaga dan Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen	Pengawasan dan Edukasi serta Pemberdayaan dan fasilitasi permasalahan konsumen	PERDAGANGAN	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
		Mengembangkan ruang lingkup akreditasi dan meningkatkan layanan pengujian, kalibrasi serta mutu barang	Pengembangan standarisasi nasional dan meningkatkan kompetensi penilaian kesesuaian mutu barang		
		Meningkatkan kinerja sub sektor perdagangan besar dan eceran melalui kemasan yang terstandarisasi dan berdaya saing	Meningkatkan *market share* produk olahan lokal melalui kemasan yang terstandarisasi dan bernilai jual	PERDAGANGAN	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

		Memperluas akses pasar ekspor, Meningkatkan kuantitas komoditi dan produk ekspor non migas dan Meningkatkan daya saing komoditi dan produk serta SDM Ekspor	Menentukan komoditi dan produk ekspor unggulan, menentukan pasar tujuan ekspor potensial, penetrasi pasar dan Meningkatkan diversifikasi komoditi dan produk ekspor	PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran

Sasaran utama dalam meningkatkan profesionalitas aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu meningkatnya kompetensi aparatur serta meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur. Untuk mencapai kedua sasaran ini perlu didukung oleh beberapa program yang kemudian dilaksanakan dalam kegiatan dan sub kegiatan.

Program yang ditetapkan merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran. Semula ada 5 (lima) Program yang diusungkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdiri dari 1 (satu) program rutin dan 5 (lima) program teknis yang kemudian hasil evaluasi tim satgas SAKIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berubah menjadi 1 (satu) program rutin dan 5 (lima) program teknis, dan dengan terakhir dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah berubah kembali menjadi 1 (satu) program rutin dan 9 (sembilan) program teknis, dengan rincian sebagai berikut:

Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2018

1. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH

   Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah merupakan program rutin Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dengan 2 indikator:

   - Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan
   - Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah

   yang akan dicapai melalui kegiatan:

   1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
   2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
   4) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
   5) Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN

   Program Pengembangan Perdagangan merupakan program urusan Perdagangan dengan tujuh indikator:

- Persentase Rumah Tangga Miskin yang bekerja di sektor Perdagangan
- Persentase Pemantauan dan Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan Pokok)
- Persentase jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan pokok) yang tersedia setiap waktu
- Persentase peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun
- Persentase Pertumbuhan nilai omset yang memanfaatkan resi gudang
- Pertumbuhan komoditi yang terjual melalui Pasar Lelang
- Persentase Pertumbuhan jumlah volume ekspor (ton)

tujuh indikator tersebut dicapai melalui kegiatan:

1) Pelaksanaan Pasar Murah
2) Verifikasi dan Pengawasan Perdagangan Sumber Daya Mineral
3) Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaku Usaha
4) Peningkatan Kemampuan SDM Perdagangan dan Produk
5) Perencanaan dan Pengelolaan Sistem Resi Gudang
6) Partipasi Pepper Day

3. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI

Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri merupakan program urusan Perindustrian dengan tujuh indikator:

- Persentase industri yang memenuhi standar
- Pertumbuhan Jumlah Industri perikanaan dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok
- Pertumbuhan Jumlah Industri perikanaan dikawasan Strategis Etalase Perikanaan Selat Nasik
- Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan Industri Terpadu (KIPT) Tanjung Ular
- Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan strategis Industri Sadai
- Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan strategis Industri Perikanaan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu
- Pertumbuhan Industri/Sentra/Kawasan Industri

tujuh indikator tersebut dicapai melalui kegiatan:

1) Peningkatan Pengembangan Pembagunan Kawasan Strategis
2) Finalisasi RPIP
3) Sistem Informasi Industri Provinsi (SIIProv)
4) Pembinaan dan Penyuluhan Pembentukan Sentra Industri
5) Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian Industri

4. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI

Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi Dan Akses Industri merupakan program urusan Perindustrian dengan tujuh indikator:

- Persentase Tenaga Kerja Industri pada Sektor Pertanian (%)
- Persentase Tenaga kerja industri terhadap total tenaga kerja
- Persentase Tenaga Kerja yang terserap di Industri Kelautan dan Perikanaan
- Persentase Tenaga Kerja yang terserap di industri pariwisata
- Persentase Tenaga Kerja yang terserap di bidang industri turunan sumber daya mineral;
- Pertumbuhan industri turunaan Potensi Sumber Daya Mineral yang dikembangkan
- Persentase Produk Industri Olahan Pangan yang memiliki informasi nutrisi

tujuh indikator tersebut dicapai melalui kegiatan:

1) Pengembangan Sumber Daya Manusia MelaluiPelatihan
2) Peningkatan DayaSaing Produk Industri
3) Rumah Pengembangan Produk
4) Pembinaan dan Pengembangan OVOP
5) Pemberdayaan Dekranasda
6) Penyuluhan dan Pendampingan Pelaku Industri oleh PFPP
7) Seminar Halal Internasional
8) Lomba Industri Kreatif
9) Promosi/Gelar Produk Industri

5. PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KEMETROLOGIAN

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian merupakan program urusan Perdagangan dengan tiga indikator:

- Persentase jumlah Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga yang diawasi sesuai standar (112 barang SNI wajib; 140 pelaku usaha Tertib Niaga)
- Indeks Keberdayaan Konsumen (0 - 20 = Tahu; 21 - 40 = Paham)
- Persentase jumlah Standarisasi Lab. Kemetrologian yang memenuhi standar

Tiga indikator tersebut dicapai melalui kegiatan:

1) Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
2) Tim Koordinasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
3) Peringatan Hari Konsumen Nasional

4) Survey Pengukuran Indeks Keberdayaan Konsumen

6. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI & PENGEMBALIAN MUTU PRODUK

Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi & Pengembalian Mutu Produk merupakan program urusan Perdagangan dengan dua indikator:

- Persentase komoditi unggulan daerah diuji yang memenuhi standar pengujiaan
- Persentase komoditi unggulan pertanian Daerah diuji yang memenuhi standar pengujian

dua indikator tersebut dicapai melalui kegiatan:

1) Peningkatan Pelayanan Pemerintah UPTD BSPM
2) Pemeliharaan dan Penambahan Status Akreditasi Laboratorium
3) Monitoring MutuPengujian
4) Pelatihan Teknis Personil Laboratorium UPTD BSPM

Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2019 - 2020

1. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH

Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah merupakan program rutin Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan dua UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dan UPTD Rumah Promosi dan Kemasan dengan dua indikator:

- Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan
- Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah

yang akan dicapai melalui kegiatan:

1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
5) Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN

Program Pengembangan Perdagangan merupakan program urusan Perdagangan dengan tiga indikator:

- Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang dibangun(%)
- Pertumbuhan Jumlah Volume Ekspor (Ton)

- Persentase Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Tersedia Setiap Waktu

tiga indikator tersebut dicapai melalui kegiatan:

1) Pelaksanaan Pasar Murah
2) Verifikasi dan Pengawasan Perdagangan Sumber Daya Mineral
3) Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaku Usaha
4) Peningkatan dan Perluasan Akses Pasar
5) Informasi Perdagangan dalam Negeri
6) Peningkatan Kemampuan Pengelola Resi Gudang
7) Perencanaan dan Pengelolaaan Sistem Resi Gudang
8) Partispasi Pepper Day
9) PeningkatanKemampuan SDM Perdagangan dan Produk

3. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI

Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri merupakan program urusan Perindustrian dengan indikator:

- Persentase Kawasan Industri dan SIKIM

indikator tersebut dicapai melalui kegiatan:

1) Peningkatan Pengembangan Pembangunan Kawasan Strategis
2) Sistem Informasi Industri Provinsi (SIIProv)
3) Pembinaan dan Penyuluhan Pembentukan Sentra Industri
4) Pendataan Perizinan Industri
5) Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian Industri
6) Peningkatan Pemahaman Standar Produk Industri
7) Pengembangan Kawasan Strategis/Kawasan Industri/Sentra
8) Pembinaan Kawasan Strategis/Kawasan Industri/Sentra

4. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI

Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi Dan Akses Industri merupakan program urusan Perindustrian dengan 2 indikator:

- Persentase Produk Industri yang Berdaya Saing
- Persentase Tenaga Kerja Sektor Industri

Dua indikator tersebut dicapai melalui kegiatan:

1) Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan
2) Peningkatan Daya Saing ProdukIndustri
3) Rumah Pengembangan Produk
4) Pembinaan dan Pengembangan OVOP

5) Pemberdayaan Dekranasda
6) Lomba Industri Kreatif
7) Promosi/ Gelar Produk Industri
8) Fasilitasi Uji Nutrisi
9) Peningkatan Daya Saing Produk Industri
10) Peningkatan Kemampuan Teknologi Tepat Guna Produk Olahan Berbasis Sumbe Daya Lokal

5. PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KEMETROLOGIAN

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian merupakan program urusan Perdagangan dengan 3 indikator:

- Persentase Barang Beredar dan Jasa yang Diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan (112 barang SNI wajib); Pelaku Usaha yang diawasi (140 pelaku usaha perdagangan)
- Jumlah Standarisasi Lab. Kemetrologian yang memenuhi standar
- Indek Keberdayaan Konsumen

Tiga indikator tersebut dicapai melalui kegiatan:

1) Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
2) Survey Pengukuran Indeks Keberdayaan Konsumen
3) Pos Layanan Pengaduan Konsumen
4) SosialisasiKelembagaan dan PemberdayaanKonsumen
5) Pelaksanaan Penentuan Penegakan Hukum Pelanggaran Dalam rangka Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Tertib Niaga
6) Pengawasan Tertib Niaga
7) Tim Koordinasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

6. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI & PENGEMBALIAN MUTU PRODUK

Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi & Pengembalian Mutu Produk merupakan program urusan Perdagangan dengan dua indikator:

- Persentase Peningkatan Komoditi Unggulan Daerah yang diuji

yang akan dicapai melalui kegiatan:

1) Peningkatan Pelayanan Pemerintah UPTD BSPM
2) Pemeliharaan dan Penambahan Status Akreditasi Laboratorium
3) Monitoring Mutu Pengujian
4) Pelatihan Teknis Personil Laboratorium UPTD BSPM
5) Sosialisasi Mutu Produk Unggulan Daerah

Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2021 – 2022

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

   Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan program rutin Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan dua UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dan UPTD Rumah Promosi dan Kemasan dengan 2 indikator:

   a) Nilai SAKIP PD yang dicapai melalui kegiatan:
      1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b) Survey Kepuasan Pelayanan Internal yang dicapai melalui kegiatan:
      1) Administrasi Keuangan
      2) Administrasi umum
      3) Administrasi umum (BPSMB)
      4) Administrasi umum (RPK)
      5) Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
      6) Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (BPSMB)
      7) Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (RPK)

2. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

   Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan merupakan program urusan Perdagangan dengan indikator Persentase Ketaatan Perdagangan Bahan Berbahaya yang akan dicapai melalui kegiatan:

   1) Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar

3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

   Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan merupakan program urusan Perdagangan dengan indikator Persentase Barang terdistribusi yang akan dicapai melalui kegiatan:

   1) Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas

4. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

   Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting merupakan program urusan Perdagangan dengan 2 indikator, indikator Persentase ketersedian Bapokting dicapai melalui kegiatan:

   1) Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi

2) Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam system informasi perdagangan,
dan indikator Persentase tersalurkannya pupuk bersubsidi akan dicapai melalui kegiatan:
3) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya

5. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Program Pengembangan Ekspor merupakan Program Urusan Perdagangan dengan indikator Nilai Ekspor Produk Non Migas (USD Juta) yang akan dicapai melalui kegiatan:

1) Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota

6. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen merupakan program urusan Perdagangan dengan 2 indikator, indikator Indeks Keberdayaan Konsumen dicapai melalui kegiatan:

1) Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
2) Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
dan indikator Persentase Layanan Terstandarisasi akan dicapai melalui kegiatan:
3) Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

7. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri merupakan Program Urusan Perdagangan dengan Indikator Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri yang akan Dicapai Melalui Kegiatan:

1) Pelaksanaan Promosi Produkdalam Negeri
2) Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri

8. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri merupakan Program Urusan Perindustrian dengan indikator Persentase pertumbuhan jumlah industri yang akan dicapai melalui kegiatan:

1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi

9. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Program Pengendalian Izin Usaha Industri merupakan Program Urusan Perindustrian dengan indikator Persentase Industri yang sesuai Izin Usaha Industri yang akan dicapai melalui kegiatan:

1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi

10. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Program PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL merupakan Program Urusan Perindustrian dengan indikator Persentase data informasi industri di SIINAS yang akan dicapai melalui kegiatan:

1) Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan yang Mendukung Tujuan dan Sasaran
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tujuan		Sasaran		Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	
1	2	3	4	5	6	7
Menumbuhkembangkan industri Bangka Belitung berbasis potensi daerah						**Persentase pertumbuhan industri (%)**
		Meningkatnya industri sektor pertanian				**Persentase pertumbuhan industri sektor pertanian (%)**
				Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri		**Presentase Tenaga Kerja Industri pada sektor pertanian**
				Pengembangan SDM melalui pelatihan		Jumlah SDM yang terlatih (pelaku industri/masyarakat)
				Pemetaan dan Penetapan SDA industri Pertanian		Jumlah Dokumen SDA industri pertanian
		Meningkatnya industri kelautan dan perikanan				**Persentase pertumbuhan industri sektor kelautan dan perikanan (%)**
				Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri		**Persentase Tenaga Kerja yang terserap di Industri Kelautan dan Perikanaan**
				Peningkatan kapasitas SDM industri sektor kelautan dan perikanan melalui pelatihan		Jumlah SDM yang terlatih
				Pemetaan dan Penetapan SDA industri Kelautan dan Perikanan		Jumlah Dokumen SDA industri Kelautan dan Perikanan
		Meningkatnya pembangunan kawasan industri				**persentase pertumbuhan industri kawasan Lepar Pongok (%)**

				Program Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri		**Pertumbuhan Jumlah Industri perikanaan dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok**
				Sistem Informasi Industri Provinsi (SIIProv)		Jumlah industri besar dan SIKIM yang terintegrasi (unit)
				Pembinaan dan penyuluhan pembentukan Sentra Industri		Jumlah lokasi pembinaan dan penyuluhan terhadap industri (lokasi)
				Pendataan Perizinan Industri		Jumlah buku yang disusun (buku)
		Meningkatnya pembangunan kawasan industri				**persentase pertumbuhan Industri kawasan Selat Nasik (%)**
				Program Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri		**Pertumbuhan Jumlah Industri perikanaan dikawasan Strategis Etalase Perikanaan Selat Nasik**
				Sistem Informasi Industri Provinsi (SIIProv)		Jumlah industri besar dan SIKIM yang terintegrasi (unit)
				Pembinaan dan penyuluhan pembentukan Sentra Industri		Jumlah lokasi pembinaan dan penyuluhan terhadap industri (lokasi)
				Pendataan Perizinan Industri		Jumlah buku yang disusun (buku)
		Meningkatnya industri sektor pariwisata				**Persentase pertumbuhan industri sektor pariwisata (%)**
				Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri		**Persentase Tenaga Kerja yang terserap di industri pariwisata**
				Seminar Halal		Jumlah Peserta
				Lomba Industri Kreatif		Jumlah Produk Kreatif
				Peningkatan kapasitas SDM Kawasan Wisata melalui pelatihan		Jumlah SDM yang Terlatih
				Pemberdayaan dekranasda		Jumlah Pelaku Industri/masyarakat
				Promosi/gelar produk industri		jumlah event
				Program Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri		**Persentase industri yang memenuhi standar**
				Pembinaan dan penyuluhan pembentukan Sentra Industri		Jumlah lokasi pembinaan dan penyuluhan terhadap industri (lokasi)
				Sistem Informasi Industri Provinsi (SIIProv)		Jumlah industri besar dan SIKIM yang terintegrasi (unit)
				Pendataan Perizinan Industri		Jumlah buku yang disusun (buku)

		Meningkatnya industri sektor pertambangan				**Persentase pertumbuhan industri sektor Pertambangan (%)**
				Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri		**Persentase Tenaga Kerja yang terserap di bidang industri turunan sumber daya mineral;**
				Peningkatan Kapasitas SDM industri turunan pertambangan melalui pelatihan		Jumlah SDM yang Terlatih
				Peningkatan Kapasitas SDM industri turunan sumber daya mineral melalui pelatihan/pendampingan		Jumlah SDM yang Terlatih
				Pemetaan dan penetapan SDA industri pertambangan timah		Jumlah Dokumen SDA industri Pertambangan Timah
				Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri		**pertumbuhan industri turunan Potensi Sumber Daya Mineral yang dikembangkan**
				Peningkatan Kapasitas SDM industri turunan pertambangan melalui pelatihan		Jumlah SDM yang Terlatih
				Peningkatan Kapasitas SDM industri turunan sumber daya mineral melalui pelatihan/pendampingan		Jumlah SDM yang Terlatih
				Pemetaan dan penetapan SDA industri pertambangan timah		Jumlah Dokumen SDA industri Pertambangan Timah
				Program Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri		**Persentase industri yang memenuhi standar**
				Pembinaan dan penyuluhan pembentukan Sentra Industri		Jumlah lokasi pembinaan dan penyuluhan terhadap industri (lokasi)
				Sistem Informasi Industri Provinsi (SIIProv)		Jumlah industri besar dan SIKIM yang terintegrasi (unit)
				Pendataan Perizinan Industri		Jumlah buku yang disusun (buku)
		Meningkatnya Pembangunan Kawasan Industri				**persentase pertumbuhan industri kawasan Tanjung Ular (%)**
				Program Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri		**Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan Industri Terpadu (KIPT) Tanjung Ular**
				Sistem Informasi Industri Provinsi (SIIProv)		Jumlah industri besar dan SIKIM yang terintegrasi (unit)

				Pembinaan dan penyuluhan pembentukan Sentra Industri		Jumlah lokasi pembinaan dan penyuluhan terhadap industri (lokasi)
				Pendataan Perizinan Industri		Jumlah buku yang disusun (buku)
		Meningkatnya Pembangunan Kawasan Industri				**persentase pertumbuhan industri kawasan Sadai (%)**
				Program Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri		**Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan strategis Industri Sadai**
				Sistem Informasi Industri Provinsi (SIIProv)		Jumlah industri besar dan SIKIM yang terintegrasi (unit)
				Pembinaan dan penyuluhan pembentukan Sentra Industri		Jumlah lokasi pembinaan dan penyuluhan terhadap industri (lokasi)
				Pendataan Perizinan Industri		Jumlah buku yang disusun (buku)
		Meningkatnya Pembangunan Kawasan Industri				**persentase pertumbuhan industri kawasan teluk klabat belinyu (%)**
				Program Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri		**Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan strategis Industri Perikanaan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu**
				Sistem Informasi Industri Provinsi (SIIProv)		Jumlah industri besar dan SIKIM yang terintegrasi (unit)
				Pembinaan dan penyuluhan pembentukan Sentra Industri		Jumlah lokasi pembinaan dan penyuluhan terhadap industri (lokasi)
				Pendataan Perizinan Industri		Jumlah buku yang disusun (buku)
		Meningkatnya Pembangunan Kawasan Industri				**persentase pertumbuhan kawasan industri (%)**
				Program Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri		**Pertumbuhan Industri/Sentra/Kawasan Industri**
				Peningkatan pengembangan pembangunan kawasan strategis		Jumlah dokumen tersusun (dokumen)
				Pengembangan kawasan strategis/kawasan industri/sentra		Jumlah dokumen tersusun (dokumen)
				Finalisasi RIPIP		Jumlah dokumen tersusun (dokumen)
				Peningkatan Pemahaman Pelaku usaha Industri dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan		Jumlah peserta (pelaku usaha)
				Peningkatan Pemahaman Standar Produk Industri		Jumlah Peserta yang memahami standar produk industri (peserta)

				Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Industri		Jumlah Industri yang diawasi (Industri)
				Pembinaan dan penyuluhan pembentukan Sentra Industri		Jumlah lokasi pembinaan dan penyuluhan pembentukan sentra industri (lokasi)
				Monev kawasan strategis/ kawasan industri/ sentra		Jumlah dokumen tersusun (dokumen)
				Pembinaan kawasan strategis/ kawasan industri/ sentra		Jumlah lokasi pembinaan (lokasi)
				Pendataan Perizinan Industri		Jumlah buku yang disusun (buku)
				Sistem Informasi Industri Provinsi (SIIProv)		Jumlah industri besar dan SIKIM yang terintegrasi (unit)
				Penyusunan profil kawasan strategis/ kawasan industri/ sentra		Jumlah profil yang tersusun (buku)
		Meningkatnya tenaga kerja industri				**persentase pertumbuhan tenaga kerja industri (%)**
				Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri		**Persentase Tenaga Kerja Industri terhadap total tenaga kerja (%)**
				Pengembangan SDM melalui pelatihan		Jumlah SDM yang terlatih (pelaku industri/masyarakat)
				Inkubator wirausaha baru		Jumlah Kelompok
				Pemberdayaan dekranasda		Jumlah Pelaku Industri/masyarakat
				Rumah pengembangan produk		jumlah pelaku industri yang terfasilitasi
				Penyuluhan dan Pendampingan Pelaku Industri oleh PFPP		Jumlah pelaku industri (pelaku Industri)
				pembinaan dan pengembangan produk OVOP		jumlah ovop
				Fasilitasi magang SDM pelaku industri		jumlah pelaku industri yang terfasilitasi
				Visualisasi pengembangan industri melalui media elektronik		jumlah program/pelaku industri
				peningkatan kerja sama dan perluasan akses industri		jumlah dokumen
				Sosialisasi, Fasilitasi dan Digitalisasi Industri		jumlah peserta
				Monitoring dan Evaluasi Perkembangan SDM industri		jumlah dokumen
				Fasilitasi Teknologi Industri		Jumlah Website

				Peningkatan kemampuan teknologi Tepat Guna Produk Olahan Berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah teknologi Tepat Guna
				Monitoring dan evaluasi pengembangan SDA		jumlah dokumen
		Meningkatnya industri yang memiliki standar kesehatan industri				**Persentase jumlah industri pangan yang memproduksi sesuai dengan standar kesehatan industri**
				Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri		**Persentase produk industri olahan pangan yang memiliki informasi nutrisi**
				Peningkatan Daya Saing Produk Industri		Jumlah Pelaku industri yang terfasilitasi
				Fasilitasi Uji Nutrisi		Jumlah Produk yang memiliki Informasi Nutrisi
Meningkatkan Pertumbuhan Industri						**Persentase Pertumbuhan Industri**
		Menumbuhkembangkan Industri berbasis potensi daerah				**Nilai Investasi Industri (Rp)**
				Program Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri		**Persentase kawasan industri dan SIKIM**
				Pengembangan SIIPROV mengenai kawasan industri/industri		Jumlah industri yang go internasional
				Pengembangan kawasan industri dan SIKIM		Jumlah dokumen DED dan peta kawasan industri yang tersusun
				Pembinaan dan Penyuluhan Pembentukan SIKIM		Jumlah Lokasi pembentukan SIKIM
				Finalisasi RPIP/RPIK		Jumlah Perda RPIP/RPIK yang tersusun
				Penyusunan profil kawasan industri dan SIKIM		Jumlah profil kawasan industri yang tersedia
				Forum Kawasan industri dan SIKIM		Jumlah peserta yang memahami kawasan industri dan SIKIM
				Peningkatan pemahaman pelaku usaha industri tentang standar produk industri dan pencegahan pencemaran lingkungan		Jumlah pelaku usaha industri yang memahami tentang standar produk industri dan pencegahan pencemaran lingkungan
				Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Industri		Jumlah industri yang diawasi

				Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri		**Persentase Produk Industri yang Berdaya Saing (%)**
				Fasilitasi Uji Nutrisi		Jumlah Produk yang memiliki informasi nutrisi
				Peningkatan kerja sama dan perluasan akses industri dengan pihak ketiga		Jumlah dokumen perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga
				Rumah Pengembangan Produk		Jumlah pelaku industri yang terfasilitasi kualitas kemasan
				Lomba Industri Kreatif		Jumlah kepesertaan pelaku industri dalam lomba produk kreatif
				Pembinaan dan Pengembangan Produk OVOP		Jumlah Produk OVOP
				Promosi/Gelar Produk Industri		Jumlah pemasaran industri kecil dan menengah
				Pemberdayaan Dekranasda		Jumlah Pelaku Industri/masyarakat
				Seminar Halal		Jumlah Peserta terfasilitasi seminar
				Fasilitasi Legalitas Usaha		Jumlah pelaku industri yang memiliki HKI, PIRT dan sertifikasi Halal
				Peningkatan Kemampuan Teknologi Tepat Guna produk olahan berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah teknologi Tepat Guna (TTG)
		Menumbuhkembangkan Industri berbasis potensi daerah				**Persentase Tenaga Kerja Industri**
				Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri		**Persentase Kualitas Tenaga Kerja Sektor Industri**
				Fasilitasi magang SDM pelaku industri		Jumlah pelaku industri yang terfasilitasi magang
				Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan		Jumlah SDM yang terlatih
				Inkubator Bisnis bagi pelaku industri		Jumlah pelaku industri yang mendapat inkubator bisnis
Pengendalian inflasi dan efisiensi distribusi perdagangan dalam negeri						**idealnya stabilitas harga kebutuhan barang pokok 2-3% (tingkat kenaikan harga)**
		Melakukan pengendalian distribusi barang kebutuhan pokok				**Ketersediaan barang kebutuhan pokok (persen;komoditi)**

				Program Pengembangan Perdagangan		**Persentase rumah tangga miskin yang bekerja disektor perdagangan**
				Peningkatan kemampuan SDM perdagangan dan produk		Jumlah Orang
				pengadaan gerobak		Jumlah gerobak (unit)
				Program Pengembangan Perdagangan		**Persentase Pemantauan dan Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan Pokok)**
				Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaku usaha		Jumlah Pelaku Usaha (Pelaku Usaha)
				Informasi perdagangan Dalam Negeri		Tersedianya data informasi harga barang pokok dan barang penting lainnya
		Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat				**Terkendalinya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)**
				Program Pengembangan Perdagangan		**Persentase jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan pokok) yang tersedia setiap waktu**
				Pelaksanaan pasar murah		JumlahPelaksanaan (kali)
				Operasi pasar murah		Jumlah Masyarakat (KK)
				Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaku usaha		Jumlah Pelaku Usaha (Pelaku Usaha)
				Informasi perdagangan Dalam Negeri		Tersedianya data informasi harga barang pokok dan barang penting lainnya
		Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan				**Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun (sarana dan prasarana)**
				Program Pengembangan Perdagangan		**Persentase peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun dan termanfaatkan**
				Pengadaan Lahan dan Pembangunan PUJASERA		Jumlah Lahan yang dibebaskan (lahan)
				Program Pengembangan Perdagangan		**Pertumbuhan nilai omzet yang memanfaatkan resi gudang**
				Perencanaan dan Pengelolaan Sistem Resi Gudang		Jumlah gudang diadakan, gudang terbangun dan sistem resi gudang yang dijalankan/terkelola (bangunan dan sistem resi gudang)
				Peningkatan kemampuan pengelola Resi Gudang		Jumlah Orang (orang)

				Program Pengembangan Perdagangan		**Pertumbuhan komoditi yang terjual melalui Pasar Lelang**
				Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditi		Jumlah Penyelenggaraan (kali)
Mengembangkan kinerja ekspor						**Nilai Ekspor Bersih (Juta US$)**
		Meningkatnya produk ekspor, eksportir dan terpantaunya produk impor				**Nilai Ekspor (Juta US$)**
				Program Pengembangan Perdagangan		**Persentase Pertumbuhan jumlah volume ekspor (ton)**
				Verifikasi dan pengawasan perdagangan sumber daya mineral		Jumlah Pelaku usaha
				Peningkatan dan Perluasan Akses Pasar		Jumlah keikutsertaan (kali)
				Partisipasi Pepper Day		Jumlah Orang
				peningkatan kompetensi pelaku usaha sektor perikanan		Jumlah Pelaku usaha
				Peningkatan pemahaman penggunaan produk dalam negeri		Jumlah masyarakat
Pengendalian Stabilitas Harga						**Stabilitas Harga Kebutuhan Barang Pokok dan Penting**
		Meningkatnya Ketersediaan Sarana Perdagangan				**Persentase Sarana Perdagangan**
				Program Pengembangan Perdagangan		**Persentase peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun**
				Pengadaan lahan dan Pembangunan PUJASERA		Jumlah Lahan yang dibebaskan untuk pembangunan PUJASERA
				Perencanaan dan Pengelolaan Sistem Resi Gudang		Jumlah gudang diadakan, gudang terbangun dan sistem resi gudang yang dijalankan/terkelola (bangunan dan sistem resi gudang)
				Pengadaan Sarana Perdagangan		Jumlah pedagang kecil yang mendapatkan gerobak
				Peningkatan Kemampuan Pengelola Resi Gudang		Jumlah Pengelola Resi Gudang yang terlatih
		Meningkatnya Nilai Ekspor				**Nilai Ekspor (USD)**

				Program Pengembangan Perdagangan		**Persentase Pertumbuhan Jumlah Volume Ekspor**
				Verifikasi dan Pengawasan Perdagangan Sumber Daya Mineral		Jumlah Pelaku Usaha yang terverifikasi dan terawasi
				Peningkatan kemampuan SDM Perdagangan dan Produk		Jumlah masyarakat/pelaku usaha yang berkompetensi
				Partisipasi Pepper Day		Jumlah pelaku usaha lada yang terakses mempromosikan produk lada
				Peningkatan Akses Pasar Ekspor		Jumlah pelaku usaha yang memahami akses pasar ekspor
				Program Designers Dispatch Service dan Pengembangan Desain		Jumlah pelaku usaha yang memenuhi syarat kemasan produk ekspor
				Peningkatan pemahaman penggunaan produk dalam negeri		Jumlah masyarakat yang memahami penggunaan produk dalam negeri
		Meningkatnya Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok				**Terkendalinya Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu (Koevisien Variasi)**
				Program Pengembangan Perdagangan		**Persentase Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia setiap waktu**
				Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaku usaha		Jumlah Pelaku usaha, distributor
				Pelaksanaan Pasar murah		Jumlah Pelaksanaan Pasar murah
				Operasi Pasar Murah		Jumlah KK miskin
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah						**Peningkatan Nilai Retribusi (%)**
		Meningkatnya jumlah Penerimaan Retribusi pengujian				**Peningkatan Nilai Retribusi sektor pertanian (%)**
				Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk		**Persentase komoditi unggulan pertanian daerah diuji yang memenuhi standar pengujiaan**
				Pemeliharaan dan penambahan status akreditasi laboratorium		Jumlah ruang lingkup
				Pembelian alat laboratorium UPTD BSPM		jumlah alat (unit)
				Jejaring kerjasama antar lab		jumlah laporan
				Pelatihan teknis personil laboratorium UPTD BSPM		jumlah personil (aparatur)

				Monitoring Mutu Pengujian		jumlah laporan
				Sosialisasi mutu produk unggulan daerah		jumlah peserta (aparatur dan masyarakat)
				Peningkatan Pelayanan pemerintah UPTD BSPM		jumlah orang (aparatur)
		Meningkatnya jumlah Penerimaan Retribusi pengujian				**Peningkatan Nilai Retribusi Sektor Pertambangan (%)**
				Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk		**Persentase komoditi unggulan daerah diuji yang memenuhi standar pengujiaan**
				Pemeliharaan dan penambahan status akreditasi laboratorium		Jumlah ruang lingkup
				Pembelian alat laboratorium UPTD BSPM		jumlah alat (unit)
				Jejaring kerjasama antar lab		jumlah laporan
				Pelatihan teknis personil laboratorium UPTD BSPM		jumlah personil (aparatur)
				Monitoring Mutu Pengujian		jumlah laporan
				Sosialisasi mutu produk unggulan daerah		jumlah peserta (aparatur dan masyarakat)
				Peningkatan Pelayanan pemerintah UPTD BSPM		jumlah orang (aparatur)
Meningkatnya Penerimaan Retribusi Balai Sertifikasi dan Pengendalian Mutu						**Persentase penerimaan retribusi dari Balai Sertifikasi dan Pengendalian Mutu (%)**
		Meningkatnya Pengujian dari Laboratorium Balai Sertifikasi dan Pengendalian Mutu				**Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Laboratorium Balai Sertifikasi dan Pengendalian Mutu;**
				Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk		**Persentase Peningkatan Komoditi Unggulan Daerah yang diuji**
				Jejaring Kerjasama AntarLab		Jumlah kerjasama
				Pengujian Komoditi Daerah		Jumlah Pengujian Komoditi Daerah
				Monitoring Mutu Pengujian		Jumlah produk yang diuji

				Peningkatan Pelayanan Pemerintah UPTD BSPM		Jumlah orang (aparatur)
				Pemeliharaan dan Penambahan Status Akreditasi Laboratorium		Jumlah ruang lingkup pengujian, jumlah sertifikasi yang diperoleh
				Sosialisasi Mutu Produk Unggulan Daerah		Jumlah peserta (aparatur dan masyarakat)
				Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk		**Persentase Besaran yang dikalibrasi**
				Pembangunan Gedung Laboratorium UPTD BSPM		Jumlah Gedung Laboratorium yang terbangun
				Pembelian Alat Laboratorium UPTD BSPM		jumlah alat (unit)
				Jejaring Kerjasama AntarLab		Jumlah kerjasama
Peningkatan Perlindungan Konsumen						**Persentase penurunan kasus pengaduan (%)**
		Penurunan Jumlah Pengaduan Konsumen				**Persentase penurunan jumlah pengaduan (%)**
				Program Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian		**Persentase jumlah Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga yang diawasi sesuai standar (112 barang SNI wajib; 140 pelaku usaha Tertib Niaga)**
				Pegawasan barang beredar dan jasa		Jumlah (barang/Jasa)
				Pengembangan SDM dalam rangka pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga		Pelaku usaha dan instansi terkait
				peningkatan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pengawasan barang beredar dan jasa serta tertib niaga		Laporan Rapat dan Koordinasi (dokumen)
				pemetaan produk dalam pengawasan barang beredar dan jasa serta tertib niaga		informasi atau data yang teridentifikasi (jenis barang dan jasa)
				pelaksanaan penentuan penegakan hukum pelanggaran dalam rangka pengawasan barang beredar dan jasa serta tertib niaga		Jumlah pelanggaran yang ditindaklanjuti secara hukum (kasus)
				pengembangan SDM penyidik pegawai negeri sipil perlindungan konsumen (PPNS-PK), petugas		Jumlah PPNSPK, PPBJ, PPNS Dag dan PPTN (orang)

				pegawas barang beredar dan jasa (PPBJ), Penyidik pegawai negeri sipil perdagangan (PPNS Dag) dan petugas pengawasan Tertib Niaga (PPTS)		
				Pengawasan Tertib niaga		Jumlah pengawasan (kali)
				Program Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian		**Indeks Keberdayaan Konsumen (0 - 20 = Tahu; 21 - 40 = Paham)**
				Peringatan hari konsumen nasional		jumlah Peserta (orang)
				sosialisasi kelembagaan dan perlindungan konsumen		jumlah peserta sosialisasi (orang)
				pos layanan pengaduan konsumen		jumlah Lokasi/pengaduan
				Tim Koordinasi Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK)		Jumlah kab/Kota (koordinasi)
				Survey pengukuran indeks keberdayaan konsumen		jumlah Konsumen (responden)
				Bimbingan teknis kelembagaan dan pemberdayaan konsumen		jumlah peserta
				Diseminasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen di berbagai media cetak		jumlah media publikasi
				klinik konsumen terpadu bagi pelajar		jumlah sekolah yang dibuka klinik
				forum dialog dengan perguruan tinggi		jumlah peserta forum dialog
				Peningkatan Fungsi BPSK		jumlah BPSK
				Program Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian		**Persentase jumlah Standarisasi Lab. Kemetrologian yang memenuhi standar**
				Penyediaan informasi dan publikasi standarisasi dan kemetrologian		Jumlah sarana/media informasi (sarana/media)
				Monitoring pelayanan kemetrologian legal		Laporan monitoring (dokumen)
				Penyusunan Daftar jumlah jenis dan massa berlaku standar ukur		Dokumen Daftar Jumlah jenis dan massa berlaku standar ukur (dokumen)
				kalibrasi standar ukur		Jumlah alat yang terkalibrasi (alat)
				penyediaan sarana dan prasarana lab kemetrologian		Jumlah sarana dan prasarana

				verifikasi dan interkomparasi standar ukur		Jumlah standar ukur (alat)
				bimbingan teknis dan diklat penguji mutu dan pranata lab		Jumlah Orang (orang)
Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha yang Sehat						**Persentase Ketersediaan Barang Beredar dan Jasa yang memenuhi Standar**
		Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha				**Persentase Pelaku usaha yang memiliki Legalitas**
				Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian		**Persentase Barang Beredar dan Jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (112 Barang SNI Wajib)**
				Pengawasan Barang Beredar dan Jasa		Jumlah Barang dan Jasa (110 Barang dan 2 Jasa) yang diawasi
				Pelaksanaan Penentuan penegakan Hukum Pelanggaran dalam rangka Pengawasan Barang Beredar dan Jasa		kasus (kasus)
				Pemetaan Produk Dalam Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Tertib Niaga		Jumlah Informasi atau data produk yang teridentifikasi dan Data Pelaku Usaha yang memiliki legalitas
				Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian		**Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam Tertib Niaga**
				Pengawasan Tertib Niaga		Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki perijinan perdagangan
				Pelaksanaan Penentuan penegakan Hukum Pelanggaran dalam rangka Pengawasan Tertib Niaga		Jumlah Pelanggaran yang ditindaklanjuti secara hukum (kasus)
				Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian		**Indeks Keberdayaan Konsumen (0 - 20 = Tahu; 21 - 40 = Paham)**
				Tim Koordinasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)		Jumlah kab/Kota yang melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk membentuk dan mengoptimalkan fungsi BPSK)
				Peringatan Hari Konsumen Nasional		Jumlah Peserta (orang) yang memahami tentang hak dan kewajiban konsumen
				Survey Pengukuran Indeks Keberdayaan Konsumen		jumlah Konsumen (orang)

				Pos Layanan Pengeaduan Konsumen		jumlah pengaduan konsumen (pengaduan)
				Bimbingan Teknis Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen		jumlah peserta (aparatur) yang meningkat pengetahuannya untuk menjadi motivator dan membantu penyelesaian sengketa konsumen
				Peningkatan Fungsi BPSK		Jumlah BPSK yang berfungsi dalam menyelesaikan sengketa konsumen
				Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian		**Persentase jumlah Standarisasi Lab. Kemetrologian yang memenuhi standar**
				Penyusunan Daftar Jumlah Jenis dan Massa berlaku standar Ukur		buku Daftar Jumlah jenis dan massa berlaku standar ukur (dokumen)
				Kalibrasi Standar Ukur		Jumlah alat yang terkalibrasi yang dapat meningkatkan rasa aman dan keterjaminan akurasi standart ukur
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Lab. Kemetrologian		Jumlah sarana dan prasarana (unit)
				Verifikasi dan Interkomparasi standar ukur		Jumlah standar ukur (alat)
Menyelenggarakan dan memberikan pelayanan administrasi perkantoran agar terwujud tertib adminstrasi perkantoran						**Persentase Tingkat Pelayanan (%)**
		Meningkatnya sarana dan prasarana sistem pelaporan dan kompetensi sumber daya Aparatur				**Persentase Tingkat Pelayanan**
				Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		**Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan**
				Pelayanan Administrasi Perkantoran		Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan (orang)
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Jumlah Aparatur Perangkat daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan (orang)
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah Aparatur perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (orang)
				Peningkatan Disiplin Aparatur		Jumlah Pegawai (orang)
				Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		**Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (Ket: AA=6 A=5 BB=4 B=3 CC=2 C=1)**

				Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan		Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% (dokumen)
				Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah dengan Realisasi Target diatas 90% (Jenis Dokumen)
				Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		**Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (Ket: AA=6 A=5 BB=4 B=3 CC=2 C=1)**
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% (dokumen)
	Meningkatkan Pertumbuhan Industri Pengolahan dan Perdagangan					**Presentase Pertumbuhan Perdagangan**
						Presentase Pertumbuhan Industri Pengolahan
			Meningkatnya Neraca Perdagangan			**Nilai Neraca Perdagangan**
					PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**Persentase Ketaatan Perdagangan Bahan Berbahaya**
					Kegiatan Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan B2 yang memiliki Perizinan Perdagangan
					Sub Kegiatan Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah Distributor/ Pengecer
					Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Produk bahan berbahaya
					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**Persentase Barang terdistribusi**
					Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan	Jumlah Komoditas yang dikelola (TON)

					Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas	
					Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah pengelolaan yang dibina (lokasi)
					PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Persentase ketersedian Bapokting**
					Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting (jenis)
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Distributor/ Sub Distributor Barang Kebutuhan Pokok
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Distributor/ Sub Distributor Barang Penting
					Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Koevisien Variasi
					Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada	Jumlah Pemantauan harga dan stok

					Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	
					Sub Kegiatan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Operasi Pasar
						Persentase Tersalurkannya Pupuk Bersubsidi
					Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi
					Sub Kegiatan Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Jumlah Pemeriksaan (dokumen)
					Sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan (laporan)
					Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk bersubsidi	Jumlah Distributor/pengecer Pupuk bersubsidi yang diawasi
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Pengawasan (laporan)
					PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	**Nilai Ekspor Produk Non Migas (USD juta)**
					Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk	Jumlah Akses Pasar Ekspor

					Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	
					Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	Jumlah Produk Siap Ekspor yang dipamerkan
					Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Permintaan Produk Dagang
					Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM perdagangan yang terlatih
					Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Eksportir/Calon Eksportir
					PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**Indeks Keberdayaan Konsumen**
					Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang terbentuk
					Sub Kegiatan Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang beroperasional
					Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsumen yang teredukasi
					Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Responden
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan (Informasi, Pertanyaan dan Pengaduan)

					Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Barang Beredar dan Jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan
					Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Jenis Barang yang diawasi
						Persentase Layanan Terstandarisasi
					Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Produk dan Peralatan yang tersertifikasi
					Sub Kegiatan Verifikasi Mutu Produk	Jumlah komoditi yang di verifikasi
					Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Sample yang di uji
					Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Alat yang dikalibrasi
					PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri
					Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri	Jumlah Permintaan Dagang
					Sub Kegiatan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Produk yang dipromosikan melalui permintaan dagang
					Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk yang Siap dipasarkan
					Sub Kegiatan Fasilitasi Pemasaran Penggunaan	Jumlah Fasilitasi Produk

					Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	
			Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Industri			**Persentase Pertumbuhan Usaha Industri**
					PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**Persentase pertumbuhan jumlah industri**
					Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Persentase pertumbuhan tenaga kerja industri
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah IKM OVOP yang dibina
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Produk Industri yang bersertifikat Uji Product dan HKI
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Kelompok Industri yang terfasilitasi Teknologi Tepat Guna
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi Dekranasda
						Jumlah SDM Indutsri yang terlatih
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Produk

					(Rumah Promosi dan Kemasan)	
					PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	**Persentase Industri yang sesuai Izin Usaha Industri**
					Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah industri yg dipantau
					Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah komitmen IUI, IUPI yang dipantau
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan provinsi	Jumlah IUI yang diawasi
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**Persentase data informasi industri di SIINAS**
					Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase Industri yang menyampaikan informasi industri secara lengkap
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Industri Yang Terdaftar di SINAS

Tabel 6.2
Rencana Program dan Kegiatan yang Mendukung Tujuan dan Sasaran
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
URUSAN PEMERINTAHAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN												**20.394.811.553**	**22.388.076.208**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH												**15.147.816.848**	**16.616.382.033**		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi	80					**213.007.000**	**234.307.700**		
Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												**213.007.000**	**234.307.700**		
								Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	**11**			**213.007.000**	**234.307.700**		
Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah												106.618.000	117.279.800		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dokumen perencanaan Renstra/Renja PD	2	106.618.000	117.279.800	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaanan												10.000.000	11.000.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dokumen DPA/DPPA yang tersusun	2	10.000.000	11.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah												6.200.000	6.820.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dokumen Pengendalian dan evaluasi PD	4	6.200.000	6.820.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah												76.389.000	84.027.900		

		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dokumen kesepakatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	1	76.389.000	84.027.900	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah												13.800.000	15.180.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dokumen Evalusi kinerja PD	3	13.800.000	15.180.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
						Survey Kepuasan Pelayanan Internal	80					**14.934.809.848**	**16.382.074.333**		
Kegiatan Administrasi Keuangan												**12.164.520.417**	**13.380.972.459**		
								Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan	80			12.164.520.417	13.380.972.459		
Sub Kegiatan Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN												12.164.520.417	13.380.972.459		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	95	12.164.520.417	13.380.972.459	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Kegiatan Administrasi umum												**2.089.875.000**	**2.298.862.500**		
								survey kepuasan pelayanan umum (angka)	80			2.089.875.000	2.298.862.500		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat												648.200.000	713.020.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Surat/Barang yang dikirim	75	2.500.000	2.750.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Materai	800	4.800.000	5.280.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah tenaga Pramubakti yang dipekerjakan	17	640.900.000	704.990.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik												128.000.000	140.800.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12	128.000.000	140.800.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor												316.600.000	348.260.000		

		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	15.000.000	16.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor yang dipekerjakan	8	301.600.000	331.760.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional												121.600.000	133.760.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah kendaraan oprasional yang dipelihara	12	8.500.000	9.350.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah tenaga sopir yang dipekerjakan	3	113.100.000	124.410.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi Keuangan												137.895.000	151.684.500		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah pengelola administrasi keuangan yang bekerja	18	137.895.000	151.684.500	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor												355.800.000	391.380.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan	9	339.300.000	373.230.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor yang tersedia	10	16.500.000	18.150.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor												35.240.000	38.764.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah jenis ATK yang dibeli	10	35.240.000	38.764.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan												15.000.000	16.500.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah barang cetak	50	4.500.000	4.950.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah penggandaan	30000	9.000.000	9.900.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah penjilidan	20	1.500.000	1.650.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor												5.000.000	5.500.000		

		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	10	5.000.000	5.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan												7.000.000	7.700.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	108	7.000.000	7.700.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan makan dan minum												26.000.000	28.600.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia	100	10.000.000	11.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	800	16.000.000	17.600.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah												170.000.000	187.000.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	19	100.000.000	110.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dilaksanakan	48	70.000.000	77.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor												10.000.000	11.000.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1	10.000.000	11.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor												24.000.000	26.400.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	24.000.000	26.400.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional												85.140.000	93.654.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Kendaraan oprasional yang dipelihara	4	85.140.000	93.654.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor												2.900.000	3.190.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	2	2.900.000	3.190.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	

Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor												1.500.000	1.650.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1	500.000	550.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah BBM Genset	125	1.000.000	1.100.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Kegiatan Administrasi umum (BPSMB)												**176.336.516**	**193.970.168**		
												176.336.516	193.970.168		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat												1.000.000	1.100.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Surat/Barang yang dikirim	30	400.000	440.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Materai	100	600.000	660.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik												58.800.000	64.680.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12	58.800.000	64.680.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan												20.035.000	22.038.500		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah pengelola administrasi keuangan yang bekerja	5	20.035.000	22.038.500	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja												2.000.000	2.200.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	1	2.000.000	2.200.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor												8.500.000	9.350.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah jenis ATK yang dibeli	10	8.500.000	9.350.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan												5.600.000	6.160.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah barang cetak	2	2.000.000	2.200.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	

		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah penggandaan	30.000	3.600.000	3.960.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor												1.500.000	1.650.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	10	1.500.000	1.650.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan makan dan minum												6.000.000	6.600.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia	20	2.000.000	2.200.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	80	4.000.000	4.400.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah												30.611.516	33.672.668		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	3	15.570.000	17.127.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dilaksanakan	12	15.041.516	16.545.668	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional												37.340.000	41.074.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah kendaraan oprasional yang dipelihara	3	37.340.000	41.074.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor												4.950.000	5.445.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan								Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	7	4.950.000	5.445.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Kegiatan Administrasi umum (RPK)												**430.897.612**	**473.987.373**		
												430.897.612	473.987.373		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat												6.750.000	7.425.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Surat/Barang yang dikirim	200	5.550.000	6.105.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Materai	200	1.200.000	1.320.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	

Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik												75.600.000	83.160.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12	75.600.000	83.160.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan												15.750.000	17.325.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah pengelola administrasi keuangan yang bekerja	5	15.750.000	17.325.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor												2.500.000	2.750.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor yang tersedia	10	2.500.000	2.750.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor												15.000.000	16.500.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah jenis ATK yang dibeli	10	15.000.000	16.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan												8.000.000	8.800.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah barang cetak	5	5.000.000	5.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah penggandaan	10000	3.000.000	3.300.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor												5.000.000	5.500.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	10	5.000.000	5.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor												129.300.000	142.230.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	7	129.300.000	142.230.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan												750.000	825.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	24	750.000	825.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	

Sub Kegiatan Penyediaan makan dan minum												4.500.000	4.950.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia	25	2.500.000	2.750.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	80	2.000.000	2.200.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah												90.938.000	100.031.800		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	10	52.850.000	58.135.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dilaksanakan	24	38.088.000	41.896.800	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor												44.259.612	48.685.573		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	44.259.612	48.685.573	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional												27.400.000	30.140.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah kendaraan oprasional yang dipelihara	1	27.400.000	30.140.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor												5.150.000	5.665.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	4	5.150.000	5.665.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (BPSMB)												**31.165.303**	**34.281.833**		
												31.165.303	34.281.833		
Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal												31.165.303	34.281.833		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan								jumlah pegawai ASN yang ikut pendidikan dan pelatihan formal	18	31.165.303	34.281.833	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (RPK)												**42.015.000**	**46.216.500**		
												42.015.000	46.216.500		

Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal												42.015.000	46.216.500		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan								jumlah pegawai ASN yang ikut pendidikan dan pelatihan formal	4	42.015.000	46.216.500	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN												**84.678.000**	**93.145.800**		
						Persentase Ketaatan Perdagangan Bahan Berbahaya	**1,00**					**84.678.000**	**93.145.800**		
Kegiatan Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar												**84.678.000**	**93.145.800**		
								Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan B2 yang memiliki Perizinan Perdagangan	3			84.678.000	93.145.800		
Sub Kegiatan Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya												44.114.000	48.525.400		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	Pangkalpinang, Bangka dan Belitung	Gabek, Sungailiat dan Tanjung Pandan	Air Salemba, Srimenanti, Tanjung Pandan					Jumlah Distributor/ Pengecer	3	44.114.000	48.525.400	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya												40.564.000	44.620.400		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	Pangkalpinang, Bangka, Bateng, Babar, Basel, Belitung dan Beltim	Girimaya, Sungailiat, Koba, Muntok, Toboali, Tanjungpandan, Manggar	Pasir Padi,Nelayan,Sungai Daeng, Koba, Sukadamai, Tanjung Pandan, Padang					Jumlah Produk bahan berbahaya	1	40.564.000	44.620.400	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN												**247.846.000**	**272.630.600**		
						Persentase Barang terdistribusi	**60**					**247.846.000**	**272.630.600**		
Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas												**247.846.000**	**272.630.600**		
								Jumlah Komoditas yang dikelola (TON)	200			247.846.000	272.630.600		
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi												247.846.000	272.630.600		

	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan tingkat kemiskinan	Bangka,Tengah, Bangka, Bangka Selatan	Pangkalan Baru, Puding , Toboali	Mangkol, Puding Besar, Toboali					Jumlah pengelolaan yang dibina (lokasi)	3	247.846.000	272.630.600	Menurunkan tingkat kemiskinan	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING												**543.625.000**	**597.987.500**		
						Persentase ketersedian Bapokting	**80**					**392.199.000**	**431.418.900**		
Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi												**127.966.000**	**140.762.600**		
								Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting (jenis)	18			127.966.000	140.762.600		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor												69.408.000	76.348.800		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	pangkalpinang, bangka tengah,bangka, bangka selatan,bangka barat, belitung, belitung timur	bukit intan, koba, sungailiat, toboali, mentok, tanjung pandan, manggar	air itam, koba, sungailiat, toboali, sungai baru, tanjung pendam, manggar					Jumlah Distributor/ Sub Distributor Barang Kebutuhan Pokok	8	69.408.000	76.348.800	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor												58.558.000	64.413.800		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	pangkalpinang, bangka tengah,bangka, bangka selatan,bangka barat, belitung, belitung timur	bukit intan, koba, sungailiat, toboali, mentok, tanjung pandan, manggar	air itam, koba, sungailiat, toboali, sungai baru, tanjung pendam, manggar					Jumlah Distributor/ Sub Distributor Barang Penting	6	58.558.000	64.413.800	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan												**264.233.000**	**290.656.300**		
								Koevisien Variasi	<11			264.233.000	290.656.300		
Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota												82.983.000	91.281.300		
	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan tingkat kemiskinan	pangkalpinang, bangka tengah,bangka, bangka selatan,bangka	bukit intan, koba, sungailiat, toboali, mentok,	air itam, koba, sungailiat, toboali,					Jumlah Pemantauan harga dan stok	84	82.983.000	91.281.300	Menurunkan tingkat kemiskinan	

			barat, belitung, belitung timur	tanjung pandan, manggar	sungai baru, tanjung pendam, manggar										
Sub Kegiatan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi												181.250.000	199.375.000		
	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan tingkat kemiskinan	pangkalpinang, bangka tengah,bangka, bangka selatan,bangka barat, belitung, belitung timur	bukit intan, koba, sungailiat, toboali, mentok, tanjung pandan, manggar	air itam, koba, sungailiat, toboali, sungai baru, tanjung pendam, manggar					Jumlah Operasi Pasar	14	181.250.000	199.375.000	Menurunkan tingkat kemiskinan	
						Persentase Tersalurkannya Pupuk Bersubsidi	**70%**					**151.426.000**	**166.568.600**		
Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya												**151.426.000**	**166.568.600**		
								Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi	11			151.426.000	166.568.600		
Sub Kegiatan Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi												41.809.000	45.989.900		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	pangkalpinang, bangka tengah,bangka, bangka selatan,bangka barat, belitung, belitung timur	bukit intan, koba, sungailiat, toboali, mentok, tanjung pandan, manggar	air itam, koba, sungailiat, toboali, sungai baru, tanjung pendam, manggar					Jumlah Pemeriksaan (dokumen)	11	41.809.000	45.989.900	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
Sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi												37.589.000	41.347.900		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	pangkalpinang, bangka tengah,bangka, bangka selatan,bangka barat, belitung, belitung timur	bukit intan, koba, sungailiat, toboali, mentok, tanjung pandan, manggar	air itam, koba, sungailiat, toboali, sungai baru, tanjung pendam, manggar					Jumlah Pengawasan (laporan)	2	37.589.000	41.347.900	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk bersubsidi												35.589.000	39.147.900		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	pangkalpinang, bangka tengah,bangka, bangka selatan,bangka barat, belitung, belitung timur	bukit intan, koba, sungailiat, toboali, mentok, tanjung pandan, manggar	air itam, koba, sungailiat, toboali, sungai baru, tanjung pendam, manggar					Jumlah Distributor/pengecer Pupuk bersubsidi yang diawasi	11	35.589.000	39.147.900	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida												36.439.000	40.082.900		

		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	pangkalpinang, bangka tengah,bangka, bangka selatan,bangka barat, belitung, belitung timur	bukit intan, koba, sungailiat, toboali, mentok, tanjung pandan, manggar	air itam, koba, sungailiat, toboali, sungai baru, tanjung pendam, manggar					Jumlah Pengawasan (laporan)	2	36.439.000	40.082.900	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR												**580.338.672**	**638.372.539**		
						Nilai Ekspor Produk Non Migas (USD juta)	**900**					**580.338.672**	**638.372.539**		
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota												**416.306.500**	**457.937.150**		
			Jakarta, Asia, Eropa	Jakarta, Asia, Eropa	Jakarta, Asia, Eropa			Jumlah Akses Pasar Ekspor	3			416.306.500	457.937.150		
Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal												67.990.000	74.789.000		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	Pangkalpinang, Bangka Tengah	Pangkalpinang, Bangka Tengah	Pangkalpinang, Bangka Tengah					Jumlah Produk Siap Ekspor yang dipamerkan	2	67.990.000	74.789.000	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan												348.316.500	383.148.150		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	Jakarta, Asia	Jakarta, Asia	Jakarta, Asia					Jumlah Permintaan Produk Dagang	6	348.316.500	383.148.150	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
												164.032.172	**180.435.389**		
			Pangkalpinang, Belitung	Pangkalpinang, Belitung	Pangkalpinang, Belitung			Jumlah SDM perdagangan yang terlatih	45			164.032.172	180.435.389		
Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor												164.032.172	180.435.389		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	Pangkalpinang, Belitung	Pangkalpinang, Belitung	Pangkalpinang, Belitung					Jumlah Eksportir/Calon Eksportir	45	164.032.172	180.435.389	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN												**813.191.533**	**894.510.686**		
						Indeks Keberdayaan Konsumen	**40 (Mampu)**					**501.038.500**	**551.142.350**		

Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota												**96.550.000**	**106.205.000**		
								Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang terbentuk	3			96.550.000	106.205.000		
Sub Kegiatan Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen												96.550.000	106.205.000		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	Bangka, Belitung, Belitung Timur	Sungailiat, Tanjungpandan, Manggar	Bukit Betung, Kota, Desa Padang					Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang beroperasional	3	96.550.000	106.205.000	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
												215.353.500	**236.888.850**		
								Jumlah Konsumen yang teredukasi	440			215.353.500	236.888.850		
Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen												120.801.500	132.881.650		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	Pangkalpinang, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur	Girimaya, Gerunggang, Taman Sari, Sungailiat, Pangkalan Baru, Koba, Muntok, Toboali, Tanjungpandan, Manggar	Pasar Padi, Taman Bunga, Genas, Sungailiat, Dul, Berok, Tanjung, Toboali, Kota, Desa Baru					Jumlah Responden	400	120.801.500	132.881.650	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen												94.552.000	104.007.200		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	Pangkalpinang, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur	Girimaya, Gerunggang, Taman Sari, Sungailiat, Pangkalan Baru, Koba, Muntok, Toboali, Tanjungpandan, Manggar	Pasar Padi, Taman Bunga, Genas, Sungailiat, Dul, Berok, Tanjung, Toboali, Kota, Desa Baru					Jumlah Pengaduan (Informasi, Pertanyaan dan Pengaduan)	40	94.552.000	104.007.200	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota												**189.135.000**	**208.048.500**		
								Persentase Barang Beredar dan Jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan	78%			189.135.000	208.048.500		

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen												189.135.000	208.048.500		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	Pangkalpinang	Taman Sari	Rawa Bangun					Jumlah Jenis Barang yang diawasi	10	189.135.000	208.048.500	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
						Persentase Layanan Terstandarisasi	**75%**					**312.153.033**	**343.368.336**		
Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota												**312.153.033**	**343.368.336**		
								Persentase Produk dan Peralatan yang tersertifikasi	90			312.153.033	343.368.336		
Sub Kegiatan Verifikasi Mutu Produk												124.701.213	137.171.334		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	Kota Pangkalpinang	Rangkui	Keramat					Jumlah komoditi yang di verifikasi	3	124.701.213	137.171.334	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Pengujian												93.525.910	102.878.501		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	Kota Pangkalpinang	Rangkui	Keramat					Jumlah Sample yang di uji	200	93.525.910	102.878.501	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Kalibrasi												93.925.910	103.318.501		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	Kota Pangkalpinang	Rangkui	Keramat					Jumlah Alat yang dikalibrasi	5	93.925.910	103.318.501	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI												**247.846.000**	**272.630.600**		
						Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri	**40**					**247.846.000**	**272.630.600**		
Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri												**141.051.000**	**155.156.100**		

			1.Tangerang	1. Kec.Pagedangan Serpong Tangerang, Prov. Banten	1. Kel. Pagedangan Kec.Pagedangan Serpong Tangerang, Prov. Banten			Jumlah Permintaan Dagang	4			141.051.000	155.156.100		
Sub Kegiatan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi												141.051.000	155.156.100		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	1.Tangerang	1. Kec.Pagedangan Serpong Tangerang, Prov. Banten	1. Kel. Pagedangan Kec.Pagedangan Serpong Tangerang, Prov. Banten					Jumlah Produk yang dipromosikan melalui permintaan dagang	8	141.051.000	155.156.100	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri												**106.795.000**	**117.474.500**		
			Pangkalpinang	Rangkui	Keramat			Jumlah Produk yang Siap dipasarkan	20			106.795.000	117.474.500		
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi												106.795.000	117.474.500		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	Pangkalpinang	Rangkui	Keramat					Jumlah Fasilitasi Produk	20	106.795.000	117.474.500	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI												**2.469.794.500,00**	**2.716.773.950,00**		
						Persentase pertumbuhan jumlah industri	5%					**2.469.794.500**	**2.716.773.950**		
Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi												**2.469.794.500**	**2.716.773.950**		
								Persentase pertumbuhan tenaga kerja industri	2%			2.469.794.500	2.716.773.950		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri												152.120.500	167.332.550		
	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	- Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur	-Taman Sari, Sungailiat, Koba, Mentok, Toboali, Tanjung Pandan, Manggar	- Gedung Nasional, Sungailiat, Koba, Sungai Daeng, Toboali, Tanjung Pandan, Buku Limau					Jumlah IKM OVOP yang dibina	26	152.120.500	167.332.550	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri												447.832.000	492.615.200		
	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	- Uji Product : Bogor, HKI: Jakarta	- Uji Product : Bogor, HKI: Jakarta	- Uji Product : Bogor, HKI: Jakarta					Jumlah Produk Industri yang bersertifikat Uji Product dan HKI	200	447.832.000	492.615.200	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri												188.538.000	207.391.800		
	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	- Bangka, Bangka Tengah, Belitung Timur	- Sungailiat, Koba, Manggar	- Sungailiat, Koba, Baru					Jumlah Kelompok Industri yang terfasilitasi Teknologi Tepat Guna	2	188.538.000	207.391.800	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat												1.035.834.000	1.139.417.400		
	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	- Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, - Jakarta	-Taman Sari, Sungailiat, Koba, Mentok, Toboali, Tanjung Pandan, Manggar, Jakarta	- Gedung Nasional, Sungailiat, Koba, Sungai Daeng, Toboali, Tanjung Pandan, Buku Limau, Jakarta					Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi Dekranasda	350	760.702.000	836.772.200	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	- Pangkalpinang, Bangka, Bangka Tengah, YogyaKarta, Jawa Tengah.	-Taman Sari, Sungailiat, Koba, Yogyakarta, Jawa Tengah	-Taman Sari, Sungailiat, Koba.Yogyakarta, Jawa Tengah					Jumlah SDM Indutsri yang terlatih	80	275.132.000	302.645.200	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Rumah Promosi dan Kemasan)												645.470.000	710.017.000		
	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	Pangkalpinang	Rangkui	Keramat					Jumlah Fasilitasi Produk	200	645.470.000	710.017.000	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI												**190.111.000**	**209.122.100**		
						Persentase Industri yang sesuai Izin Usaha Industri	30%					190.111.000	209.122.100		

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi												**190.111.000**	**209.122.100**		
								Jumlah industri yg dipantau	55			190.111.000	209.122.100		
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik												89.013.000	97.914.300		
			Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang	Sungai liat (Bangka), Lubuk Besar (Bangka Tengah), Tukak Sadai (Bangka Selatan), Muntok (Bangka Barat), Badau (Belitung), Manggar (Belitung Timur), Pangkal balam (Pangkalpinang)	Sungai liat (Sungai liat), Batu Beriga (Lubuk Besar), Sadai (Tukak Sadai), Air Putih (Muntok), Pengantungan (Badau), Air Kelik (Manggar), Ketapang (Pangkal balam)					Jumlah komitmen IUI, IUPI yang dipantau	5	89.013.000	97.914.300		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan provinsi												101.098.000	111.207.800		
			Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang	Bakam, Belinyu, Puding, Mendo Barat,Sungai liat (Bangka), Pangkalan Baru, Koba (Bangka Tengah), Simpang Rimba (Bangka Selatan), Simpang Teritip, Tempilang, Kelapa, Muntok (Bangka Barat), Membalong, Badau, Sijuk, (Belitung), Manggar, Dendang, Kelapa Kampit (Belitung Timur), Pangkal balam, Bukit Intan (Pangkalpinang)	Mabat (Bakam), Gunung Muda (Belinyu), Puding (Puding Besar), Cekong Abang (Mendo Barat),Sungai liat (Sungai liat), Air Mesu (Pangkalan Baru), Arung Dalam (Koba), Malik (Simpang Rimba), Terentang (Simpang Teritip), Tempilang (Tempilang), Dendang (Kelapa), air Belo (Muntok), Kembiri (Membalong),Sungai Samak, Air Batu Buding (Badau), air Kelik (Manggar), Jangkang (Dendang), Buding, Senyubuk (Kelapa Kampit), Ketapang (Pangkal balam), Semabung lama(Bukit Intan)					Jumlah IUI yang diawasi	50	101.098.000	111.207.800		
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL												**69.564.000**	**76.520.400**		
						Persentase data informasi industri di SIINAS	70					69.564.000	76.520.400		

Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)												**69.564.000**	**76.520.400**		
								Persentase Industri yang menyampaikan informasi industri secara lengkap	60			69.564.000	76.520.400		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)												69.564.000	76.520.400		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang	Sungai liat (Bangka), Lubuk Besar (Bangka Tengah), Tukak Sadai (Bangka Selatan), Muntok (Bangka Barat), Badau (Belitung), Manggar (Belitung Timur), Pangkal balam (Pangkalpinang)	Sungai liat (Sungai liat), Batu Beriga (Lubuk Besar), Sadai (Tukak Sadai), Air Putih (Muntok), Pengantungan (Badau), Air Kelik (Manggar), Ketapang (Pangkal balam)					Jumlah Industri Yang Terdaftar di SINAS	25	69.564.000	76.520.400	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Tujuan sasaran strategi dan arah kebijakan

Indikator kinerja daerah adalah alat ukur spesifik untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD 2017 -2022 dapat dicapai.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkontribusi untuk mewujudkan tujuan Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Perkapita masyarakat dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dengan sasaran Meningkatnya pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha melalui sasaran strategis Meningkatkan Pertumbuhan Industri Pengolahan dan Perdagangan sebagaimana ditampilkan dalam tabel VII.1 berikut:

Tabel 7.1.1
Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA PERINDAG	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD
						2018	2019	2020	2021	2022	
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi				4,47	4,3	4,4	4,5			
		Meningkatnya pembangunan berbasis industri	Persentase Pertumbuhan Produksi Sektor Industri Pengolahan		6,22	2,63	2,65	1,25			
				Persentase Pertumbuhan Industri (%)		5	5	5			
				Nilai Investasi Industri (Rp)			9.157.209.890	14.157.209.890			
				Persentase Tenaga Kerja Industri			0.82	1.37			
	Meningkatnya Pengeluaran Pemerintah dan Pendapatan Masyarakat					1.890	1.940	1.980			
		Menurunnya Angka Inflasi	Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		6,75	06.42	06.31	06.24			
				Persentase Ketersediaan Sarana Perdagangan			1.15	1.15			
				Nilai Ekspor (Juta US$)			1.668.488.999,16	1.835.337.899,07			
				Terkendalinya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)			<11	<11			
				Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas			35%	57%			
				Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen			2	3			
		Meningkatnya Pendapatan Pemerintah Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Daerah				0,253	0,257			
				Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang			146	10			

Tabel 7.1.2
Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan

No	TUJUAN RPJMD PERUBAHAN	SASARAN RPJMD PERUBAHAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA PERINDAG	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD
						2018	2019	2020	2021	2022	
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi						4,50	4,55	4,55
		Meningkatnya nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	Laju Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan						1,5	2,0	2,0
				Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan					0,16	0,16	0,16
				Persentase Pertumbuhan Perdagangan					0,031	0,033	0,033
				Persentase Pertumbuhan Usaha Industri					1	1	1
				Nilai Neraca Perdagangan					1.528.414.791	1.529.881.791	1.529.881.791

BAB VIII
PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Revisi Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022 merupakan penjabaran visi dan misi dan penerjemahan kebijakan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 di bidang perindustrian dan perdagangan.

Revisi Renstra ini memuat Visi, Misi, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan pembangunan Bangka Belitung selama lima tahun kedepan sebagai acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Revisi Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Laporan Kinerja (LKj).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Revisi Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud. Dengan demikian, penting bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaan dokumen, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan SKPD dan Kabupaten/Kota dalam bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat Bangka Belitung.

8.2. Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2022, dimana masa bakti Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 2017 - 2022 yang berakhir pada tanggal 11 Mei 2022, sedangkan periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan Desember 2022, oleh karena itu dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Tahun 2022. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 tersebut adalah program transisi, disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2022 adalah "program sementara" sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubenur terpilih untuk masa jabatan tahun 2017 - 2022. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam renstra dan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 - 2022.

8.3. Kaidah Pelaksanaan

Revisi Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022 yang disusun melalui berbagai tahapan: persiapan, penyusunan rancangan, akhir Renstra dan diakhiri dengan penetapan. Setelah RPJMD ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD menjadi Rancangan Akhir Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuannya adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pangkalpinang, Agustus 2020

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Pemprov, Air Itam, Bukit Intan, Pangkalpinang 33148
Telp : 0717 – 439 093 Web : http://perindag.babelprov.go.id
Fax : 0717 – 439 093 email : perindag@babelprov.go.id